



# **RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)**

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN BANYUMAS  
TAHUN 2021**

# **BAB I**

## **GAMBARAN UMUM**

### **1.1. PENDAHULUAN**

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu kebijakan berkaitan dengan sistem pengendalian yang harus dibuat oleh Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Guna menindaklanjuti kebijakan SPIP tersebut maka Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang mewajibkan kepada pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan SPIP.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan, menyadari sepenuhnya akan pentingnya penyelenggaraan SPIP. Sistem pengendalian intern yang dibangun akan efektif dan efisien jika dirancang dengan tepat. Untuk itu diperlukan langkah-langkah dan perencanaan yang strategis dalam upaya mengintegrasikan konsep SPIP ke dalam kegiatan dan tindakan di Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas.

#### **1.1.1. Latar Belakang**

Sebagai kelanjutan reformasi birokrasi di bidang keuangan negara dengan mengacu kepada Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara dan UU Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, serta untuk menciptakan *good governance* sesuai UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas KKN, maka diperlukan sistem pengendalian intern dalam mengelola keuangan negara/ daerah. Mengingat pentingnya sistem pengendalian intern, selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang merupakan turunan dari UU Nomor 1 Tahun 2004 mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,  
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten

Banyumas sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan, menyadari sepenuhnya akan pentingnya menyelenggarakan SPIP. Didorong oleh kesadaran tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas telah, sedang dan akan selalu menyelenggarakan SPIP. Agar sistem pengendalian intern yang dibangun efektif dan efisien diperlukan suatu rancangan yang tepat. Untuk itu, diperlukan suatu rencana tindak pengendalian yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam rangka mengamankan upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Tujuan tersebut di atas dapat tercapai jika SPIP berjalan dengan baik. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas memerlukan suatu Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas. RTP merupakan uraian mengenai desain rencana pengendalian atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Banyumas sehingga diharapkan dapat memberikan keyakinan atas pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja.

#### **1.1.2. Dasar Hukum**

Dasar hukum implementasi penyelenggaraan SPIP pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas adalah:

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 3) Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- 4) Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan

Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah;

- 5) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2017 tentang Penilaian Risiko pada Perangkat Daerah.

### **1.1.3. Maksud dan Tujuan**

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas untuk mengenali kondisi lingkungan pengendalian, risiko, dan tindakan pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan / penyimpangan dan/ atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

### **1.1.4. Manfaat**

Manfaat penyusunan dokumen RTP di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas antara lain sebagai berikut :

- 1) Sebagai dasar pengembangan SPIP secara menyeluruh hingga tercipta keterpaduan antara sub-sub unsur SPIP dengan lingkungan pengendalian dalam aktivitas dan kegiatan sehari-hari;
- 2) Sebagai dasar dalam membangun instrumen pengendalian sebagai bagian dari penyelenggaraan SPIP;
- 3) Sebagai dasar pendokumentasian, pemantauan dan pengukuran kemajuan penyelenggaraan SPIP;
- 4) Sebagai dasar penyusunan *Statement of Responsibilities* (SOR).

### **1.1.5. Ruang Lingkup**

RTP ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di tingkat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas. Pelaksanaan

RTP melibatkan seluruh jajaran pimpinan / tingkatan manajemen, pegawai dan unit kerja di lingkungan kerja di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas. Penyusunan RTP untuk tahun 2021 mengacu pada Program dan Kegiatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagai berikut:

1. Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
  1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota;
    1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota.
  2. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota;
    1. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi;
    2. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi.
  3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
    1. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.
2. Program Perlindungan Perempuan
  1. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota;
    1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota;
    2. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.
  2. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota;

1. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota;
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota.
3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
  1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota;
  2. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
  1. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
    1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.
4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
  1. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota
    1. Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota.
5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
  1. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota;
    1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
6. Program Perlindungan Khusus Anak
  1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.
7. Program Pengendalian Penduduk
    1. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
      1. Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota;
      2. Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal;
      3. Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal Di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan.
    2. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota
      1. Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan
8. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
    1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal;
      1. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai kearifan budaya lokal;
      2. Pengendalian Program KKBPK.
    2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB);
      1. Pembinaan IMP dan Program KKBPK di lini lapangan oleh PKB/PLKB;
      2. Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB.
    3. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota;
      1. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya;

2. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
  3. Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB;
  4. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya;
  5. Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan.
4. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB.
    1. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK Di Kampung KB
9. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
    1. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
      1. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS);
      2. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS).

## **BAB II**

### **SEKILAS TENTANG SPIP**

#### **2.1. Pengertian SPIP**

Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Definisi SPI dan SPIP dipahami Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan pimpinan dan seluruh pegawai terintegrasi dengan kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi.

#### **2.2. Tujuan SPIP**

Tujuan SPIP sebagaimana disebutkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

#### **2.3. Unsur-unsur SPIP**

Unsur-unsur SPIP yang ditetapkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah sebagai berikut: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Adapun penyelenggaraan SPIP pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas berkaitan dengan unsur-unsurnya, dapat diuraikan sebagai berikut:

##### **a. Lingkungan Pengendalian**

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektifitas pengendalian intern. Lingkungan

pengendalian merupakan pencerminan integrasi antara kualitas kepemimpinan, sumber daya manusia, dan metode kerja. Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan (*management oversight*) untuk dapat menyempurnakan gaya kepemimpinan yang tepat dan kebijakan yang tepat. Selain itu, dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat formalitas.

b. Penilaian Risiko

Penilaian risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko. Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi, analisis dan evaluasi risiko. Penilaian risiko merupakan pencerminan dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas. Penilaian risiko dilakukan atas:

- Penilaian risiko strategis Pemerintah Daerah;
- Penilaian risiko strategis OPD; dan
- Penilaian risiko operasional/kegiatan OPD.

c. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan. Karakteristik kegiatan pengendalian yang ditetapkan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas sekurang-kurangnya telah memperhatikan bahwa kegiatan pengendalian:

- 1) Diutamakan pada kegiatan/ tujuan pokok;
- 2) Dikaitkan dengan proses penilaian risiko;

- 3) Ditetapkan dengan kebijakan dan prosedur tertulis;
- 4) Dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan;
- 5) Dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan eksistensi kegiatan pengendalian.

d. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam rangka penyelenggaraan SPIP merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan kegiatan instansi. Informasi dan komunikasi mencakup pengumpulan dan penyajian informasi kepada pegawai agar mereka dapat melakukan tanggung jawabnya, termasuk pemahaman akan peran dan tanggung jawabnya sehubungan dengan pengendalian intern. Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Sistem Informasi Manajemen diselenggarakan untuk dapat menghasilkan laporan mengenai kegiatan, kondisi capaian kinerja, penerapan manajemen risiko, dan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, DPPKBP3A Kabupaten Banyumas juga menyelenggarakan sistem komunikasi yang mampu memberikan informasi kepada seluruh pihak, baik intern maupun ekstern.

Struktur organisasi DPPKBP3A Kabupaten Banyumas memungkinkan adanya arus informasi yang memadai, yaitu informasi ke atas, ke bawah dan lintas satuan kerja/unit:

- Informasi ke atas untuk memastikan bahwa pimpinan mengetahui risiko dan kinerja DPPKBP3A Kabupaten Banyumas. Saluran informasi ini harus dapat merespon untuk pelaksanaan langkah-langkah perbaikan dan dapat diketahui oleh jajaran manajemen.
- Informasi ke bawah untuk memastikan bahwa tujuan, strategi dan ekspektasi DPPKBP3A Kabupaten Banyumas serta kebijakan dan prosedur yang berlaku telah dikomunikasikan

kepada para manajer di tingkat bawah dan para pelaksana.

- Informasi lintas satuan kerja/unit untuk memastikan bahwa informasi yang diketahui oleh suatu satuan kerja tertentu dapat disampaikan kepada satuan kerja lain yang terkait, khususnya untuk mencegah benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan dan untuk menciptakan koordinasi yang memadai.

e. Pemantauan Pengendalian Intern

Dalam rangka meyakinkan bahwa revisi kebijakan dan prosedur dilaksanakan oleh para penanggung jawab kegiatan serta untuk meyakinkan bahwa kebijakan dan prosedur yang direvisi dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan mengatasi risiko-risiko yang ada maka harus dilakukan monitoring oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas terkait implementasi perbaikan kebijakan dan prosedur serta efektifitas kebijakan dan prosedur yang diperbaiki dalam mengatasi risiko-risiko yang ada. Rencana monitoring atas perbaikan/pembuatan Kebijakan dan Prosedur serta pelaksanaan kebijakan dan prosedur hasil revisi dalam rangka menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan mengatasi risiko-risiko, harus ditetapkan agar kegiatan pengendalian yang akan dilakukan monitoring atau evaluasi dapat tercapai dengan baik.

**4. Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibilities*)**

Pasal 56 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan Kepala Daerah dengan jajarannya (Kepala SKPD) selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan SPI yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan tersebut dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan yang harus didukung dengan fakta bahwa pengendalian intern memang diselenggarakan secara memadai. Pernyataan selaras dengan siklus penyelenggaraan SPIP mulai dari identifikasi tujuan sampai dengan pemantauan efektivitas pengendalian yang dibuat dan dipantau setiap tahun. RTP merupakan

sarana untuk mendukung SPIP dengan indentifikasi dan analisis risiko program dan kegiatan Perangkat Daerah.

## BAB III

### LINGKUNGAN PENGENDALIAN

#### 3.1. Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan

Lingkungan pengendalian adalah pondasi bagi unsur-unsur sistem pengendalian intern. Lingkungan pengendalian menentukan keberhasilan/ kegagalan penerapan SPI. Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan dan dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat formalitas. Pembangunan lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas bertujuan untuk:

- a. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
- b. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
- c. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
- d. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat;
- f. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Terwujudnya Satuan Pengawasan Intern di unit kerja yang berperan efektif; dan
- h. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

#### 3.2. Kondisi Lingkungan Pengendalian

Kondisi Lingkungan Pengendalian Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas secara umum cukup memadai. Hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas diperoleh gambaran sebagai berikut:

**Tabel 1. Kondisi lingkungan pengendalian Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas**

No	Sub. Unsur	Kondisi
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Memadai
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Memadai
3	Kepemimpinan yang Kondusif	Memadai

4	Pembentukan Struktur Organisasi yang sesuai dengan kebutuhan	Memadai
5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	Memadai
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	Memadai
7	Perwujudan Peran APIP yang Efektif	Memadai
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah terkait	Memadai

Dari 8 (delapan) sub unsur pada Lingkungan Pengendalian tersebut di atas masih terdapat kelemahan sebagai berikut:

1. Pada sub unsur **Penegakan Integritas dan Nilai Etika**
  - ✓ Kurangnya disiplin pegawai dan pengendalian dan pengawasan dari atasan langsung belum optimal.  
berdasarkan LHP Tahun 2019:
    - a. Terdapat Pegawai yang belum memenuhi ketentuan Jam Kerja;
2. Pada sub unsur **Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat**
  - ✓ Terdapat Pegawai dan/atau PPTK yang belum maksimal dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya yang telah didelegasikan/ diperintahkan, berdasarkan:
    - 1) LHP Tahun 2019:
      - a. Laporan Bulanan Kepegawaian belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan;
      - b. Bendahara Pengeluaran lalai dalam menatausahakan keuangan;
      - c. Penatausahaan keuangan belum tertib;
      - d. Pengelolaan Biaya Operasional dan Distribusi Alokasi tidak sesuai ketentuan;
      - e. Pengelolaan barang inventaris tidak tertib.
    - 2) LHP Tahun 2020:
      - a. Buku Penjagaan Cuti PNS belum dilaksanakan;
      - b. Terdapat keterlambatan pembayaran atas penyesuaian Gaji Berkala;
      - c. Pada kegiatan Pengadaan Barang Inventaris Kantor (AC), PPKom tidak menetapkan HPS;
      - d. Administrasi keuangan beberapa kegiatan tidak dipertanggungjawabkan secara lengkap;
      - e. Pengelolaan barang inventaris belum tertib.

### 3.3. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian

Atas kelemahan lingkungan pengendalian yang ada saat ini, langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dan merupakan prioritas untuk segera dilaksanakan adalah sebagai berikut.

**Tabel 2. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian**

No	Sub Unsur/Rencana Tindak Perbaikan/ Penguatan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika		
	Menginformasikan pelaksanaan aturan perilaku dan norma-norma kepada seluruh pegawai melalui pembinaan rutin secara berkala	Kepala DPPKBP3A	Triwulan IV 2021
2	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat		
	Melaksanakan kontrol dan evaluasi dalam pelaksanaan dan pembagian tugas kepada bawahan dan mendorong terjalinnya komunikasi yang baik dan harmonis antar unit lini	Kepala DPPKBP3A	Triwulan IV 2021

Rincian penilaian kondisi Lingkungan Pengendalian dapat dilihat pada

Lampiran I:

- Form 1.a : Rekapitulasi hasil kuesioner penilaian lingkungan pengendalian intern Control Environment Evaluation (CEE);*
- Form 1.b : CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern di DPPKBP3A Kabupaten Banyumas;*
- Form 1.c : Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern DPPKBP3A Kabupaten Banyumas.*

## **BAB IV**

### **PENILAIAN RISIKO**

#### **4.1. Penetapan Konteks/ Tujuan**

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pada prinsipnya, konteks pengelolaan risiko pemerintah daerah dilakukan atas tujuan (strategis) pemerintahan daerah dan tujuan pada tingkatan kegiatannya, yang secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a. Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah
- b. Pengelolaan risiko strategis OPD; dan
- c. Pengelolaan risiko operasional/kegiatan OPD.

Dengan memahami tujuan yang hendak dicapai pada tiap tingkatan, risiko pada setiap tingkatan tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis.

Bupati Banyumas Periode 2018-2023 telah menetapkan visi dan misi yang tercantum dalam RPJMD. Visi tersebut adalah “Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri”. Visi tersebut kemudian dijabarkan menjadi 8 (delapan) misi sebagai berikut:

- a. Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik;
- b. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan;
- c. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan;
- d. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan;
- e. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan;
- f. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan;
- g. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal;
- h. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.

Kedelapan misi tersebut diterjemahkan melalui penetapan tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang pencapaiannya menjadi tanggung jawab OPD.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas mendukung misi kedua Bupati Banyumas Tahun 2018-2023 yaitu “Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan”.

Dalam upaya pencapaian misi tersebut, penetapan konteks risiko Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

No	Konteks	Tujuan Strategis/ Kegiatan	Sasaran	Indikator
1.	Risiko strategis Pemerintah Daerah	Meningkatkan pembangunan yang berkeadilan ( <b>Tujuan dalam RPJMD</b> )	1. Meningkatnya pengendalian pertumbuhan penduduk; 2. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ( <b>Sasaran dalam RPJMD</b> )	1. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP); 2. Indeks Pemberdayaan Perempuan (IDG); 3. Indeks Pembangunan Gender (IPG); 4. Nilai Kabupaten Layak Anak.
2.	Risiko strategis OPD	1. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk; 2. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak ( <b>Tujuan dalam Renstra DPPKBP3A</b> )	1. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk; 2. Meningkatkan kualitas pembangunan perempuan; 3. Meningkatkan kualitas pemberdayaan perempuan; 4. Meningkatkan kualitas perlindungan anak ( <b>Sasaran dalam Renstra DPPKBP3A</b> )	1. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP); 2. Indeks Pemberdayaan Perempuan (IDG); 3. Indeks Pembangunan Gender (IPG); 4. Nilai Kabupaten Layak Anak.
3.	Risiko operasional/ kegiatan OPD	1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan		Jumlah Kelembagaan PUG

		Kabupaten/Kota		
		2. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah organisasi perempuan
		3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang tersedia
		4. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah penanganan kasus kekerasan perempuan yang sesuai SOP;</li> <li>• Jumlah pendampingan litigasi;</li> <li>• Jumlah pendampingan non litigasi</li> </ul>
		5. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah kasus kekerasan perempuan;</li> <li>• Jumlah pengaduan yang ditangani.</li> </ul>
		6. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah lembaga layanan perlindungan perempuan

		7. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan peningkatan kualitas hidup keluarga
		8. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Jumlah OPD yang memanfaatkan Data Pilah Gender dan Anak
		9. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan fasilitasi kabupaten dan kecamatan layak anak
		10. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah kasus anak yang ditangani;</li> <li>• Jumlah kasus anak perempuan yang ditangani.</li> </ul>
		11. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah kelompok masyarakat peduli KB dalam program KKBPK;</li> <li>• Jumlah kelompok PLKB yang melaporkan data pengendalian penduduk.</li> </ul>
		12. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah informasi data mikro keluarga setiap desa yang dilaporkan
		13. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenis dukungan manajemen dalam program KKBPK;</li> <li>• Frekuensi Penyuluhan oleh PLKB/PKB.</li> </ul>

		14. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Petugas Pembina KB desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan
		15. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Balai Penyuluhan KB yang mendapatkan sarana dan prasarana penunjang bagi PKB/PLKB ;</li> <li>• Jumlah anggota kelompok kegiatan (BKB,BKR,BKL) yang berstatus PUS;</li> <li>• Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun;</li> <li>• Jumlah faskes yang tercukupi alat dan obat kontrasepsinya;</li> <li>• Jumlah Peserta KB Aktif;</li> <li>• Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS);</li> <li>• Jumlah kelembagaan kelompok kesehatan reproduksi remaja (PIK-R dll).</li> </ul>

		16. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah OPD yang berperan aktif dalam kampung KB;</li> <li>• Jumlah Kampung KB yang aktif kegiatannya.</li> </ul>
		17. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Pertemuan Kelompok UPPKS;</li> <li>• Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera(PPKS) di setiap kecamatan</li> </ul>

Rincian penetapan konteks risiko dapat dilihat pada Lampiran I,

*Form 2.a : Penetapan konteks risiko strategis Pemda*

*Form 2.b : Penetapan konteks risiko strategis OPD DPPKBP3A*

*Form 2.c : Penetapan konteks risiko operasional DPPKBP3A*

#### 4.2. Identifikasi Risiko

Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko. Dari identifikasi yang dilakukan, diperoleh risiko dengan rincian sebagai berikut:

No	Pernyataan Risiko
<b>A</b>	<b>Risiko Strategis Pemerintah Daerah</b>
1	Terdapat risiko ketidakpahaman dan juga ketidakpedulian masyarakat/ pengguna layanan terhadap substansi teknis layanan perangkat daerah sehingga dapat mengakibatkan pencapaian indikator yang tidak maksimal (LPP, IDG, IPG dan Nilai Kabupaten Layak Anak)
<b>B</b>	<b>Risiko Strategis OPD</b>
1	OPD belum maksimal dalam mengelola sumberdaya SDM dan Efektivitas kinerjanya sehingga dapat berakibat pada pencapaian indikator yang tidak maksimal (LPP, IDG, IPG dan Nilai Kabupaten Layak Anak)
<b>C</b>	<b>Risiko Operasional/Kegiatan OPD</b>
	<b>1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>
1)	Masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait Pengarusutamaan Gender (PUG) dan belum maksimalnya komitmen/ dukungan kelembagaan pemerintah dalam program PUG sehingga pencapaian indikator dalam pelembagaan PUG tidak maksimal
2)	Belum terwujudnya proses perencanaan penganggaran yang responsig gender
	<b>2. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota</b>
1)	Belum tertibnya administrasi dalam pengelolaan organisasi kemasyarakatan (perempuan) sehingga eksistensi kelembagaan perempuan tidak berkembang secara dinamis
	<b>3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>
1)	Masih terbatasnya tenaga fasilitator dan belum terbangunnya kreatifitas sehingga berdampak pada masih terbatasnya lembaga layanan pemberdayaan perempuan
	<b>4. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>
1)	Terbatasnya tenaga ahli/ pendamping dalam penanganan kasus yang dapat berakibat tidak maksimalnya pelayanan penanganan kasus
	<b>5. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>
1)	Kerentanan ekonomi dan kondisi sosial masyarakat yang belum mapan yang menyebabkan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan masih tinggi
	<b>6. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>
1)	Terbatasnya SDM yang berkompetensi dalam pelayanan kasus sehingga dapat berdampak pada menurunnya jumlah dan kemampuan layanan terhadap perlindungan perempuan
	<b>7. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>
1)	Masih tingginya angka ibu hamil yang rentan karena fisik dan nutrisinya sehingga berdampak pada kesehatan ibu dan bayinya
2)	Masih terbatasnya pengetahuan dan motivasi keluarga dalam kesetaraan gender (KG) dan hak anak yang menyebabkan kualitas kehidupan keluarga masih rendah

<b>8. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota</b>	
1)	Terbatasnya personil yang menguasai teknologi informasi yang berdampak pada tidak maksimalnya pengelolaan data Gender dan Anak
<b>9. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	
1)	Minimnya informasi terkait Pemenuhan Hak-hak Anak di masyarakat, yang berdampak pada minimnya kelembagaan anak
2)	Kurangnya kompetensi teknis bagi pengelola kegiatan anak yang dapat berdampak pada pencapaian kinerjanya
<b>10. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	
1)	Kesulitan ekonomi dan rendahnya pengetahuan terkait hak-hak anak yang berdampak pada masih tingginya kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap anak
<b>11. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>	
1)	Belum tumbuhnya kesadaran dan inisiatif dari PUS tentang pengetahuan KB sehingga animo untuk ber-KB belum optimal
2)	Wilayah yang sulit dijangkau oleh sinyal internet berdampak pada kualitas dan kuantitas laporan data yang terganggu dan tidak tepat waktu
<b>12. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	
1)	Terbatasnya kompetensi personil yang mengelola data kependudukan sehingga pengelolaan data pengendalian penduduk tidak maksimal
2)	Tidak maksimalnya komitmen petugas lapangan dalam menjangkau dan mengumpulkan data yang dibutuhkan sehingga data sering terlambat masuk
<b>13. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	
1)	Cara pandang dan berpikir yang berbeda terkait program KKBPK masih tinggi sehingga efektifitas dalam perekrutan akseptor KB baru terus menurun yang berdampak pada menurunnya frekuensi penyuluhan
2)	Peran dan komitmen manajemen dalam pengelolaan program KB belum efektif dan inovatif sehingga antusiasme dalam ber KB menurun
<b>14. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>	
1)	Komitmen pengelola kegiatan yang belum efektif dalam menyokong Petugas Lapangan sehingga keberhasilan dalam mencetak kader-kader KB belum maksimal
<b>15. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota</b>	
1)	Kompetensi Pengelola pengadaan barang belum maksimal sehingga proses pengadaan barang untuk sarana penunjang tidak berjalan efektif
2)	Pengelola kegiatan KKR (BKB,BKR,BKL) belum maksimal dalam mengelola kegiatannya sehingga progress kemajuan dan jumlah kelompok tidak berkembang secara signifikan
3)	Petugas dan pengelola pendistribusian alokon tidak secara tertib dalam merencanakan dan melaksanakan pendistribusian, serta kurangnya komunikasi

	dengan faskes yang berdampak pada terganggunya stok dan pelayanan KB tidak maksimal
4)	Sosialisasi dalam pelayanan program KB belum berjalan maksimal sehingga berdampak pada menurunnya angka keikutsertaan KB di masyarakat
5)	Keseriusan pengelola kegiatan dan keterlibatan pengurus organisasi dalam mendukung program KB tidak maksimal yang berdampak pada monotonnya kegiatan remaja yang peduli KB dan tidak berkembangnya jumlah organisasi
<b>16. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>	
1)	Pengelolaan Kampung KB belum maksimal sehingga kegiatan dan geliat Kampung KB tidak berkembang ke arah yang lebih baik
<b>17. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	
1)	Pengelolaan pembangunan keluarga belum dilaksanakan secara maksimal dan berkelanjutan sehingga kelompok-kelompok kegiatan tidak berkembang baik secara jumlah maupun kompetensinya
2)	Petugas maupun Pengelola kegiatan belum menguasai substansi secara mendasar sehingga pembentukan kelompok-kelompok kegiatan tidak berkembang secara dinamis
3)	Minimnya alokasi dana dalam kegiatan yang menyulitkan pergerakan dan pengembangan kegiatan

Rincian identifikasi risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I:

*Form 3.a : Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah*

*Form 3.b : Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis OPD*

*Form 3.c : Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Operasional OPD*

#### 4.3. Analisis Risiko

##### 4.3.1. Analisis kemungkinan dan dampak risiko

Hasil identifikasi risiko kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan kriteria penilaian risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran II. Penentuan nilai kemungkinan dan dampak dilakukan melalui survey terhadap ASN di lingkungan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas. Dari hasil survei tersebut diperoleh informasi sebagai berikut:

a. Risiko Strategis Pemerintah Daerah

No	Level Risiko	Risiko
1	Sedang	Terdapat risiko ketidakpahaman dan juga ketidakpedulian masyarakat/ pengguna layanan terhadap substansi teknis layanan perangkat daerah sehingga dapat mengakibatkan pencapaian indikator yang tidak maksimal (LPP, IDG, IPG dan Nilai Kabupaten Layak Anak)

b. Risiko Strategis OPD

No	Level Risiko	Risiko
1	Sedang	OPD belum maksimal dalam mengelola sumberdaya SDM dan Efektivitas kinerjanya sehingga dapat berakibat pada pencapaian indikator yang tidak maksimal (LPP, IDG, IPG dan Nilai Kabupaten Layak Anak)

c. Risiko Operasional OPD

No	Level Risiko	Risiko
1.	Sedang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait Pengarusutamaan Gender (PUG) dan belum maksimalnya komitmen/ dukungan kelembagaan pemerintah dalam program PUG sehingga pencapaian indikator dalam pelembagaan PUG tidak maksimal;</li> <li>2. Terbatasnya tenaga ahli/ pendamping dalam penanganan kasus yang dapat berakibat tidak maksimalnya pelayanan penanganan kasus;</li> <li>3. Kerentanan ekonomi dan kondisi sosial masyarakat yang belum mapan yang menyebabkan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan masih tinggi;</li> <li>4. Masih tingginya angka ibu hamil yang rentan karena fisik dan nutrisinya sehingga berdampak pada kesehatan ibu dan bayinya;</li> <li>5. Kurangnya kompetensi teknis bagi pengelola kegiatan anak yang dapat berdampak pada pencapaian kinerjanya;</li> <li>6. Kesulitan ekonomi dan rendahnya pengetahuan terkait hak-hak anak yang berdampak pada masih tingginya kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap anak.</li> </ol>
2.	Rendah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya pemahaman OPD terkait PUG sehingga belum terwujudnya proses perencanaan penganggaran yang responsif gender;</li> <li>2. Belum tertibnya administrasi dalam pengelolaan organisasi kemasyarakatan (perempuan) sehingga eksistensi kelembagaan perempuan tidak berkembang secara dinamis;</li> <li>3. Masih terbatasnya tenaga fasilitator dan belum terbangunnya kreatifitas sehingga berdampak pada masih terbatasnya lembaga</li> </ol>

	<p>layanan pemberdayaan perempuan;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>4. Terbatasnya SDM yang berkompentensi dalam pelayanan kasus sehingga dapat berdampak pada menurunnya jumlah dan kemampuan layanan terhadap perlindungan perempuan;</li><li>5. Masih terbatasnya pengetahuan dan motivasi keluarga dalam kesetaraan gender (KG) dan hak anak yang menyebabkan kualitas kehidupan keluarga masih rendah;</li><li>6. Terbatasnya personil yang menguasai teknologi informasi yang berdampak pada tidak maksimalnya pengelolaan data Gender dan Anak;</li><li>7. Minimnya informasi terkait Pemenuhan Hak-hak Anak di masyarakat, yang berdampak pada minimnya kelembagaan anak;</li><li>8. Belum tumbuhnya kesadaran dan inisiatif dari PUS tentang pengetahuan KB sehingga animo untuk ber-KB belum optimal;</li><li>9. Wilayah yang sulit dijangkau oleh sinyal internet berdampak pada kualitas dan kuantitas laporan data yang terganggu dan tidak tepat waktu;</li><li>10. Terbatasnya kompetensi personil yang mengelola data kependudukan sehingga pengelolaan data pengendalian penduduk tidak maksimal;</li><li>11. Tidak maksimalnya komitmen petugas lapangan dalam menjangkau dan mengumpulkan data yang dibutuhkan sehingga data sering terlambat masuk;</li><li>12. Cara pandang dan berpikir yang berbeda terkait program KKBPK masih tinggi sehingga efektifitas dalam perekrutan akseptor KB baru terus menurun yang berdampak pada menurunnya frekuensi penyuluhan;</li><li>13. Peran dan komitmen manajemen dalam pengelolaan program KB belum efektif dan inovatif sehingga antusiasme dalam ber KB menurun;</li><li>14. Komitmen pengelola kegiatan yang belum efektif dalam menyokong Petugas Lapangan sehingga keberhasilan dalam mencetak kader-kader KB belum maksimal;</li><li>15. Kompetensi Pengelola pengadaan barang belum maksimal sehingga proses pengadaan barang untuk sarana penunjang tidak berjalan efektif;</li><li>16. Pengelola kegiatan KKR (BKB,BKR,BKL) belum maksimal dalam mengelola kegiatannya sehingga progress kemajuan dan jumlah kelompok tidak berkembang secara signifikan;</li><li>17. Pengelolaan Kampung KB belum maksimal sehingga kegiatan dan geliat Kampung KB tidak berkembang ke arah yang lebih baik;</li><li>18. Pengelolaan pembangunan keluarga belum dilaksanakan secara</li></ol>
--	--

		<p>maksimal dan berkelanjutan sehingga kelompok-kelompok kegiatan tidak berkembang baik secara jumlah maupun kompetensinya;</p> <p>19. Petugas maupun Pengelola kegiatan belum menguasai substansi secara mendasar sehingga pembentukan kelompok-kelompok kegiatan tidak berkembang secara dinamis;</p> <p>20. Minimnya alokasi dana dalam kegiatan yang menyulitkan pergerakan dan pengembangan kegiatan.</p>
3.	Sangat Rendah	<p>1. Petugas dan pengelola pendistribusian alokon tidak secara tertib dalam merencanakan dan melaksanakan pendistribusian, serta kurangnya komunikasi dengan faskes yang berdampak pada terganggunya stok dan pelayanan KB tidak maksimal;</p> <p>2. Sosialisasi dalam pelayanan program KB belum berjalan maksimal sehingga berdampak pada menurunnya angka keikutsertaan KB di masyarakat;</p> <p>3. Keseriusan pengelola kegiatan dan keterlibatan pengurus organisasi dalam mendukung program KB tidak maksimal yang berdampak pada monotonnya kegiatan remaja yang peduli KB dan tidak berkembangnya jumlah organisasi</p>

Rincian hasil analisis risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 4: Formulir Kertas Kerja Hasil Analisis Risiko*.

#### 4.3.2. Memvalidasi Risiko

Dari hasil analisis risiko tersebut diputuskan risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani yaitu risiko dengan level “Sangat Tinggi”, “Tinggi” dan “Sedang”. Terhadap risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani, pemerintah daerah membangun pengendalian untuk menurunkan kemungkinan munculnya risiko (preventif), menurunkan dampak dari risiko yang muncul (mitigatif), atau keduanya. Rincian daftar risiko prioritas selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 5: Formulir Kertas Kerja Daftar Risiko Prioritas*.

#### 4.3.3. Mengevaluasi Pengendalian yang Ada dan yang Dibutuhkan

Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam rangka mengelola risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektifitasnya. Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika:

- a. Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi;

- b. Prosedur pengendalian belum dilaksanakan;
- c. Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas;
- d. Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.

Hasil penilaian atas pengendalian yang ada dan pengendalian yang masih dibutuhkan selengkapnya disajikan dalam Lampiran I:

*Form 6 : Formulir Kertas Kerja Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Lingkungan Pengendalian*

*Form 7 : Formulir Kertas Kerja Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Mengatasi Risiko*

#### 4.3.4. Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi.

##### 4.3.4.1. Merumuskan Tindakan untuk Mengatasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang telah teridentifikasi, dibuat RTP lingkungan pengendalian. Rincian Rencana Tindak Pengendalian untuk Lingkungan Pengendalian dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 6 (kolom f – h)*.

##### 4.3.4.2. Merumuskan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan dalam Rangka Mengatasi Risiko

RTP atas risiko dimaksudkan untuk menentukan pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi risiko. Dalam menentukan pengendalian yang akan dibangun perlu memperhatikan respon risiko. Respon risiko membantu instansi pemerintah dalam memfokuskan kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian dilakukan dengan tepat. Respon risiko terdiri dari beberapa pilihan, yaitu:

- a. Menghindari Risiko (*Avoid*)
- b. Mengubah/Mengurangi Kemungkinan Munculnya Risiko (*Abate*)

- c. Mengubah/Mengurangi Konsekuensi/Dampak Risiko (*Mitigate*)
- d. Membagi Risiko (*Share*) atau Mentransfer Risiko
- e. Menerima atau Mempertahankan Risiko (*Accept/Retain*)

RTP tersebut ditetapkan baik untuk risiko strategis pemerintah daerah, strategis (entitas) OPD, dan operasional. Rencana Tindak Pengendalian tersebut meliputi Pengendalian yang Dibangun untuk Mengatasi Risiko, Penanggung Jawab, dan Target Waktu Penyelesaian.

Rincian Rencana Tindak Pengendalian untuk Mengatasi Risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 7 (kolom g – i)*.

#### 4.3.4.3. Menyelaraskan Rencana Tindak Pengendalian

Dokumen RTP Akhir yang disusun berasal dari dua Rencana Tindak Pengendalian, yaitu rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian dan rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian. Terdapat kemungkinan merupakan bentuk adanya kebutuhan terhadap pengendalian yang sama atau berhubungan dari kedua RTP tersebut. Oleh sebab itu, pada tahap ini perlu memperhatikan kemungkinan tersebut dan menyelaraskan kedua rencana tindak perbaikan pengendalian tersebut sehingga dapat menghindari duplikasi rencana tindak perbaikan pengendalian.

#### 4.3.4.4. Menyusun Rancangan Informasi dan Komunikasi atas RTP

Rancangan informasi dan komunikasi merupakan rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan. Rancangan pengomunikasian pengendalian yang dibangun disajikan dalam Lampiran I *Form 8 (kolom a – f)*.

*(Form 8 merupakan rancangan kegiatan yang akan*

*dilaksanakan pada tahun 2021 sehingga masih terdapat kolom yang kosong)*

#### 4.3.4.5. Menyusun Rancangan Monitoring dan Evaluasi Risiko dan RTP

Rencana Tindak Pengendalian perlu memuat mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif. Rancangan monitoring risiko dan RTP disajikan dalam Lampiran I *Form 9 (kolom a – e)*.

*(Form 9 merupakan rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 sehingga masih terdapat kolom yang kosong).*

## **BAB V**

### **KEGIATAN PENGENDALIAN**

Setelah dicapai kesepakatan tentang perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan Rencana Tindak Pengendalian. Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP; Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko. Infrastruktur pengendalian yang dibangun berupa kebijakan dan prosedur pengendalian. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka membangun infrastruktur pengendalian meliputi:
  - a. Mengumpulkan data berupa RTP final, peraturan perundang-undangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan infrastruktur pengendalian yang akan dibangun;
  - b. Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila diperlukan;
  - c. Membuat atau menyempurnakan insfrastruktur pengendalian;
  - d. Melakukan uji coba penerapan pengendalian;
  - e. Menyempurnakan rancangan infrastruktur pengendalian berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba;
  - f. Menetapkan penerapan insfrastruktur pengendalian.
2. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian  
Terhadap semua infrastuktur pengendalian yang telah dibuat, instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati oleh seluruh pejabat, pegawai, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

Untuk mengimplementasikan kegiatan pengendalian, Inspektorat Daerah telah menyusun infrastruktur dalam rangka pengendalian risiko, di antaranya:

1. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas;

2. Keputusan Inspektur Kabupaten Banyumas Nomor 700/07/Tahun 2020 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Keputusan Inspektur Kabupaten Banyumas Nomor 700/42/Tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas.

Selain penyusunan peraturan dan keputusan, aktivitas pengendalian yang dilaksanakan juga dikaitkan dengan hasil penilaian risiko yang telah dilakukan sebelumnya. Aktivitas pengendalian yang telah dilaksanakan terhadap risiko operasional/kegiatan di antaranya adalah:

1. Evaluasi SPIP;
2. Reviu dan pendampingan penyusunan RTP;
3. Monev dan paparan hasil pengawasan secara rutin;
4. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
5. Penyusunan Peta Kompetensi.

Namun demikian, kegiatan pengendalian yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah ini masih belum sempurna dan masih membutuhkan kegiatan-kegiatan lain untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengendalian. Untuk itu di pada Tahun 2021 telah direncanakan dalam RTP jenis-jenis pengendalian serta penanggung jawab dan target waktu penyelesaiannya seperti tercantum dalam Lampiran I, *Form 6 dan 7*.

## **BAB VI**

### **INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

Setelah infrastruktur pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada disepakati, DPPKBP3A perlu mengomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait misalnya Kepala Daerah, Kepala OPD terkait, pelaksana kegiatan, dan sebagainya. Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait sesuai rencana pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas merumuskan bagaimana komunikasi yang paling efektif tentang perbaikan pengendalian akan dilakukan. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP meliputi:

1. Surat Edaran Bupati kepada unit kerja atas pemberlakuan kebijakan;
2. Kebijakan di-upload dalam situs resmi pemerintah daerah (antara lain JDIH) yang dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan;
3. Sosialisasi/workshop/diseminasi yang dibuktikan misalnya dengan undangan, notulen/laporan pelaksanaan, daftar hadir, foto pelaksanaan,

Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam Lampiran I, *Form 8 (kolom a – f)*. *Pelaksanaan pengkomunikasian dilakukan pada Tahun 2021 ketika akan merealisasikan RTP.*

## **BAB VII**

### **PEMANTAUAN**

Pemantauan atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan yang akan dilaksanakan tersebut meliputi:

1. Pemantauan atas implementasi pengendalian

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Rancangan pemantauan atas implementasi pengendalian dilakukan dengan mengisi Lampiran I, *Form 9 (kolom f dan g)*.

2. Pemantauan kejadian risiko

Dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka pemerintah daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (*risk event*) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan. Pencatatan atas pemantauan kejadian risiko dilakukan dengan mengisi Lampiran I, *Form 10 (kolom d – g, dan kolom j – k)*.

*Pemantauan dilakukan pada bulan Februari – Maret Tahun 2022.*

*Laporan tersebut disampaikan kepada Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas paling lambat bulan April Tahun 2022.*

**BAB VII**  
**PENUTUP**

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) SPIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan SPIP dalam rangka memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan. Dokumen Rencana Tindak Pengendalian ini menjadi instrument untuk merencanakan dan memantau capaian perbaikan infrastruktur pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien dan mencapai tujuan/sasaran. Pemantauan atas pelaksanaan RTP ini dan evaluasi atas efektivitas pengendalian yang ada akan menentukan efektifitas RTP yang telah disusun.

Purwokerto, 27 November 2020

KEPALA DPPKBP3A  
KABUPATEN BANYUMAS

SUYANTO, S.H., M.Hum.

Pembina Utama Muda

NIP. 19621101-199203 1 007

REKAPITULASI HASIL KUISIONER PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN  
CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)

NO	PERTANYAAN/KUISIONER	JAWABAN RESPONDEN																												MODUS	SIMPULAN KUISIONER CEE				
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28			R29	R30	R31	R32
<b>I PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA</b>																															Memadai				
1	Pegawai mendapatkan pesan integritas dan nilai etika secara rutin dari pimpinan OPD (misalnya keteladanan, pesan moral dll)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	2	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	2	3	4	4	4	4,0		
2	OPD telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	2	4	4	3	3	3	4	4	3	4	3	4	3	4	4	3	3	4,0	
3	Telah terdapat fungsi khusus di dalam OPD yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	2	4	3	3	3	3	4	4	3	4	4	4	2	1	4	4	4	4,0	
4	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	2	4	3	3	3	3	3	3	4	3	4	2	1	4	4	3	4,0		
<b>II KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI</b>																															Memadai				
1	Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah ditentukan	4	4	4	4	4	4	4	3	2	4	4	4	2	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	1	4	4	4	4,0	
2	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan	4	4	4	3	4	4	4	4	2	3	3	4	2	4	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	1	4	4	4	4,0	
3	OPD telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	4	4	2	4	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	4	3	4	3	1	4	4	4	4,0	
4	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.	4	4	4	4	4	3	4	4	2	3	4	4	2	4	4	3	4	3	2	3	3	4	4	3	4	3	4	3	3	4	4	4	4,0	
<b>III KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF</b>																															Memadai				
1	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	2	4	4	3	4	3	3	3	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4,0	
2	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	2	4	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4,0	
3	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan risiko/masalah	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	3	4	3	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	3	4,0	
4	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	3	3	4,0		
5	Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemda	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4,0	
6	Rencana/sasaran strategis Pemda telah dijabarkan kedalam sasaran OPD dan tingkat operasional OPD	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	3	3	3	3	4	4	3	4	4	4	2	4	4	4	4	4,0	
7	Rencana strategis dan rencana kerja OPD telah menyajikan informasi mengenai risiko	4	4	4	4	4	2	4	3	2	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4,0	
8	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	3	4	4	3	4	3	4	3	3	4	4	3	4	4	4	2	4	4	4	3	4,0	
<b>IV PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN</b>																															Memadai				
1	Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh OPD dan unit kerja yang tepat	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	2	4	4	4	4	4,0	
2	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	2	4	4	4	4	4,0	

NO	PERTANYAAN/KUISIONER	JAWABAN RESPONDEN																																MODUS	SIMPULAN KUISIONER CEE
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32		
3	Pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat adhoc (sementara)	4	4	4	3	4	3	4	4	3	3	4	3	2	4	4	3	4	3	3	3	4	4	3	4	3	4	3	1	4	3	3	4,0		
4	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	3	3	3	3	4	3	4	2	3	4	3	4	4,0		
V	<b>PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT</b>																																	Memadai	
1	Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	4	4	2	4	4	3	4	3	3	3	3	4	4	3	4	3	4	2	4	4	4	3	4,0	
2	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	4	4	2	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	4	2	4	4	4	4	4,0		
3	Kewenangan direviu secara periodik	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	2	4	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	4	3	4	1	4	4	4	4	4,0	
VI	<b>PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>																																	Memadai	
1	OPD telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)	4	4	4	3	4	4	4	4	2	3	4	4	2	4	4	3	4	3	3	3	3	4	4	3	4	3	4	2	3	4	4	3	4,0	
2	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik	4	4	4	3	4	4	3	3	2	3	4	4	2	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	4	4	3	3,0		
3	Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	3	4	3	4	1	4	4	4	3	4,0	
4	OPD telah menginternalisasi budaya sadar risiko	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	4	4	3	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	2	4	4	4	4	4,0		
5	Adanya pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)	4	4	4	3	4	3	3	3	1	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	4	3	4	2	4	4	3	3	4,0	
6	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4	3	4	4	3	4	3	4	3	3	3	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4,0		
7	OPD telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM	4	4	4	4	4	4	3	1	4	4	2	3	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	2	4	4	3	3	4,0		
VII	<b>PERWUJUDAN PERAN APIP YANG EFEKTIF</b>																																	Memadai	
1	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas efisiensi/efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program Secara periodik	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	3	3	3	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	3	4,0		
2	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	3	4,0		
3	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	3	4	3	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4,0		
4	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	3	3	3	3	4	4	3	4	4	4	2	4	4	3	4	4,0		
5	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	2	4	4	3	4	4	3	3	3	4	4	3	4	4	4	2	4	4	4	3	4,0		
VIII	<b>HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT</b>																																	Memadai	
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	4	4	4	2	4	4	4	4	4,0		
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/pemeriksaan (Inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	4	4	4	2	4	4	4	3	4,0		

**CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern  
pada DPPKBP3A Kabupaten Banyumas**

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas			
Tahun Penilaian	: 2020			
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
No.	Sumber data	Uraian Kelemahan	Uraian Kekuatan	Klasifikasi
a	b	c	d	e
1	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 700/046.OP/075/IRB.I/2019	Kurangnya disiplin pegawai yang bersangkutan dan pengendalian dan pengawasan dari atasan langsung belum optimal.	Pembinaan secara rutin Kepala OPD dalam Apel dan Rapat Dinas	Penegakan Integritas dan Nilai Etika
2	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 700/0536.OP/69/IRB.I/2020	Terdapat Pegawai dan/atau PPTK yang belum maksimal dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya yang telah didelegasikan/ diperintahkan	Rapat Struktural, Pembinaan rutin Pimpinan kepada PPTK/Pelaksana	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat

\*) Klasifikasi permasalahan menggunakan sub unsur Lingkungan Pengendalian dalam PP 60 Tahun 2008.

Keterangan :

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan sumber data

Kolom c diisi dengan uraian kelemahan jika berdasarkan data yang ada merupakan kelemahan, atau

Kolom d diisi dengan uraian kekuatan jika berdasarkan data yang ada merupakan kekuatan

Kolom e diisi dengan klasifikasi kelemahan/kekuatan sesuai sub unsur pada lingkungan pengendalian

**Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern  
pada DPPKB3A Kabupaten Banyumas**

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Banyumas							
Tahun Penilaian : 2020							
No.	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Kurang Memadai	Kurangnya disiplin pegawai yang bersangkutan dan pengendalian dan pengawasan dari atasan langsung belum optimal.	Memadai	Integritas dan Nilai Etika telah ditegakkan	Kurang Memadai	Masih terdapat pegawai yang indisipliner
2	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	Kurang Memadai	Terdapat Pegawai dan/atau PPTK yang belum maksimal dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya yang telah didelegasikan/diperintahkan	Memadai	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab telah dilaksanakan dengan tepat	Kurang Memadai	Masih terdapat pekerjaan/ kegiatan yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya

## Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan sub unsur pada lingkungan pengendalian

Kolom c diisi dengan simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen

Kolom d diisi dengan uraian simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen

Kolom e diisi dengan simpulan hasil survei persepsi

Kolom f diisi dengan uraian simpulan sesuai hasil survei persepsi

Kolom g diisi dengan simpulan sesuai hasil penilaian awal dan survei persepsi, jika hasil antara penilaian awal dan survei persepsi bertentangan, maka lakukan pendalaman atau lakukan *professional judgement* untuk menyimpulkannya

Kolom h diisi dengan uraian kelemahan

## PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMDA

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas	
Tahun Penilaian	: 2020	
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2018-2023	
Sumber Data	RPJMD Kabupaten BANYUMAS Tahun 2018-2023	
Tujuan Strategis RPJMD	Tujuan 1	Pewujudan tata kelola pemerintahan yang baik
	Tujuan 2	Meningkatkan kualitas SDM terutama derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat
	<b>Tujuan 3</b>	<b>Meningkatkan pembangunan yang berkeadilan</b>
	Tujuan 4	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan meningkatkan peran sektor pertanian dan non pertanian
	Tujuan 5	Meningkatkan ketahanan pangan melalui sektor agribisnis
	Tujuan 6	Perwujudan pembangunan kawasan industri dan strategis yang berwawasan lingkungan untuk perluasan kesempatan kerja
	Tujuan 7	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat
	Tujuan 8	Menumbuhkan dan mengembangkan Daya Tarik pariwisata dan ekonomi kreatif
	Tujuan 9	Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat
Penetapan konteks Risiko Strategis	<b>Tujuan 3 Meningkatkan pembangunan yang berkeadilan</b>	
Nama Dinas Terkait	DPPKBP3A	
	BPBD	
	DINSOSPERMASDES	
Sasaran RPJMD	Sasaran 7	Meningkatnya perlindungan dan pemberdayaan masyarakat miskin
	Sasaran 8	Meningkatnya penanganan bencana
	<b>Sasaran 9</b>	<b>Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</b>
	Sasaran 10	Menurunnya kesenjangan antar wilayah
	<b>Sasaran 11</b>	<b>Meningkatnya pengendalian pertumbuhan penduduk</b>
IKU Sasaran RPJMD	Indeks Pembangunan Gender	
	Indeks Pemberdayaan Gender	
	Nilai Kabupaten Layak Anak	
	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	
Prioritas pembangunan dan program unggulan	1. Program Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	
	2. Program Perlindungan Perempuan	
	3. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	
	4. Program Peningkatan Kualitas Keluarga	
	5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	
	6. Program Perlindungan Khusus Anak	
	7. Program Pengendalian Penduduk	
	8. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	
	9. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan 3	Meningkatkan pembangunan yang berkeadilan
	Sasaran 9	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
	Sasaran 11	Meningkatnya pengendalian pertumbuhan penduduk
	1. Program Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	
	2. Program Perlindungan Perempuan	
	3. Program Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	
	4. Program Peningkatan Kualitas Keluarga	
	5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	
	6. Program Perlindungan Khusus Anak	
	7. Program Pengendalian Penduduk	
	8. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	
	9. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	
	Purwokerto, 7 November 2020	
 SUYANTO, S.H., M.Hum. Pembina Utama Muda NIP. 196211011992031007		

## PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD

## DPPKBP3A KABUPATEN BANYUMAS

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas															
Tahun Penilaian	: 2020															
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2018-2023															
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana															
OPD yang Dinilai	: DPPKBP3A Kabupaten Banyumas															
Sumber Data	Rancangan Awal Renstra DPPKBP3A Kabupaten Banyumas															
Tujuan Strategis	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak															
Sasaran Strategis	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk Meningkatkan kualitas pembangunan perempuan Meningkatkan kualitas pemberdayaan perempuan Meningkatkan kualitas perlindungan anak															
IKU Renstra OPD	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>IKU</th> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)</td> <td>0,82</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Indeks Pembangunan Gender</td> <td>87,67</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Indeks Pemberdayaan Gender</td> <td>67,6</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Nilai Kabupaten Layak Anak</td> <td>750</td> </tr> </tbody> </table>		IKU	2023	1.	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0,82	2.	Indeks Pembangunan Gender	87,67	3.	Indeks Pemberdayaan Gender	67,6	4.	Nilai Kabupaten Layak Anak	750
	IKU	2023														
1.	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0,82														
2.	Indeks Pembangunan Gender	87,67														
3.	Indeks Pemberdayaan Gender	67,6														
4.	Nilai Kabupaten Layak Anak	750														
Informasi lain	-															
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	<p>Tujuan Strategis :</p> <p>Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak</p> <p>Sasaran Strategis:</p> <p>Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk Meningkatkan kualitas pembangunan perempuan Meningkatkan kualitas pemberdayaan perempuan Meningkatkan kualitas perlindungan anak</p> <p>IKU Strategis:</p> <p>Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Indeks Pembangunan Gender Indeks Pemberdayaan Gender Nilai Kabupaten Layak Anak</p>															
<p>Purwokerto, 27 November 2020</p> <p>KEPALA DPPKBP3A KABUPATEN BANYUMAS</p>  <p>SUXANTO, S.H., M.Hum. Pemimpin Utama Muda NIP. 196211041992031007</p>																

## PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL

## DPPKBP3A KABUPATEN BANYUMAS

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas
Tahun Penilaian	: 2020
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2018-2023
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
OPD yang Dinilai	: DPPKBP3A KABUPATEN BANYUMAS
Sumber Data	Renja DPPKBP3A Kabupaten Banyumas Tahun <a href="#">2021</a>
Tujuan Strategis	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak
Program DPPKBP3A KABUPATEN BANYUMAS (Renja 2021) dan Kegiatan Utama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</li> <li>b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</li> <li>c. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota</li> </ol> </li> <li>2. Program Perlindungan Perempuan <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>b. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</li> <li>c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</li> </ol> </li> <li>3. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</li> </ol> </li> <li>4. Program Peningkatan Kualitas Keluarga <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota</li> </ol> </li> <li>5. Program Pemenuhan Hak Anak (Pha) <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</li> </ol> </li> <li>6. Program Perlindungan Khusus Anak <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</li> </ol> </li> <li>7. Program Pengendalian Penduduk <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</li> <li>b. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</li> </ol> </li> <li>8. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</li> <li>b. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</li> <li>c. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>d. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</li> </ol> </li> <li>9. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</li> </ol> </li> </ol>

Keluaran/Hasil Kegiatan	Persentase kelembagaan PUG yang aktif		
	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG		
	Jumlah kelembagaan PUG dan organisasi perempuan yang aktif dalam implementasi PUG di daerah		
	Rasio perempuan korban kekerasan		
	Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data gender dan anak sebagai dasar perencanaan pembangunan		
	Persentase keluarga yang mendapat pengarahan terkait peningkatan kualitas keluarga		
	Jumlah kelembagaan pelayanan pemenuhan hak anak sesuai standar (Forum Anak Kabupaten, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan)		
	Rasio anak korban kekerasan		
	Preferensi kekerasan pada anak perempuan		
	Persentase wilayah yang terjangkau pelayanan tenaga lini lapangan KB		
	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk		
	Rasio Petugas Pembina KB desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan		
	Rata-rata jumlah anak perkeluarga		
	Persentase Perangkat Daerah (Dinas / Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB		
	Rasio Ketergantungan		
	Rasio Akseptor KB		
	Angka Kelahiran Total TFR		
	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun		
	Angka pemakaian kontrasepsi CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49 tahun		
	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		
	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi		
	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15 - 19 tahun) per 1000 perempuan usia 15 - 19 tahun (ASFR 15 - 19 tahun)		
	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB		
	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB		
	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber KB		
	Informasi Lain	-	
Kegiatan, dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko	Kegiatan	Indikator	
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kelembagaan PUG	
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah organisasi perempuan	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang tersedia	

	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah penanganan kasus kekerasan perempuan yang sesuai SOP;</li> <li>• Jumlah pendampingan litigasi;</li> <li>• Jumlah pendampingan non litigasi</li> </ul>	
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah kasus kekerasan perempuan;</li> <li>• Jumlah pengaduan yang ditangani</li> </ul>	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan perlindungan perempuan	
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan peningkatan kualitas hidup keluarga	
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Jumlah OPD yang memanfaatkan Data Pilah Gender dan Anak	
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan fasilitasi kabupaten dan kecamatan layak anak	
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah kasus anak yang ditangani;</li> <li>• Jumlah kasus anak perempuan yang ditangani.</li> </ul>	
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah kelompok masyarakat peduli KB dalam program KKBPK;</li> <li>• Jumlah kelompok PLKB yang melaporkan data pengendalian penduduk.</li> </ul>	

	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah informasi data mikro keluarga setiap desa yang dilaporkan	
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenis dukungan manajemen dalam program KKBPK;</li> <li>• Frekuensi Penyuluhan oleh PLKB/PKB.</li> </ul>	
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Petugas Pembina KB desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Balai Penyuluhan KB yang mendapatkan sarana dan prasarana penunjang bagi PKB/PLKB ;</li> <li>• Jumlah anggota kelompok kegiatan (BKB,BKR,BKL) yang berstatus PUS;</li> <li>• Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun;</li> <li>• Jumlah faskes yang tercukupi alat dan obat kontrasepsinya;</li> <li>• Jumlah Peserta KB Aktif;</li> <li>• Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS);</li> <li>• Jumlah kelembagaan kelompok kesehatan reproduksi remaja (PIK-R dll).</li> </ul>	
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah OPD yang berperan aktif dalam kampung KB;</li> <li>• Jumlah Kampung KB yang aktif kegiatannya.</li> </ul>	
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Pertemuan Kelompok UPPKS;</li> <li>• Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera(PPKS) di setiap kecamatan</li> </ul>	
		<p>Purwokerto, 27 November 2020</p> <p>KEPALA DPPKBP3A KABUPATEN BANYUMAS</p>  <p>SUYANTO, S.H., M.Hum. Pembina Utama Muda NIP. 89031101-199203 1 007</p>	

## Formulir Kertas Kerja Identifikasi

## Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas
Nama OPD	: DPPKBP3A Kabupaten Banyumas
Tahun Penilaian	: 2020
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD (Tahun 2018-2023)
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
	Tujuan Strategis Pemda									
	Tujuan 3 Meningkatkan pembangunan yang berkeadilan									
	Sasaran 9									
	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender	Terdapat risiko ketidakpahaman dan juga ketidakpedulian masyarakat/ pengguna layanan terhadap substansi teknis layanan perangkat daerah sehingga dapat mengakibatkan pencapaian indikator yang tidak maksimal (LPP, IDG, IPG dan Nilai Kabupaten Layak Anak)		Kepala Daerah	Ketidakpahaman dan ketidakpedulian masyarakat/pengguna layanan	eksternal	C	Pencapaian indikator yang tidak maksimal (LPP, IDG, IPG dan Nilai Kabupaten Layak Anak)	1. Kepala Daerah 2. Masyarakat 3. OPD Terkait
		Indeks Pemberdayaan Gender	Terdapat risiko ketidakpahaman dan juga ketidakpedulian masyarakat/ pengguna layanan terhadap substansi teknis layanan perangkat daerah sehingga dapat mengakibatkan pencapaian indikator yang tidak maksimal (LPP, IDG, IPG dan Nilai Kabupaten Layak Anak)		Kepala Daerah	Ketidakpahaman dan ketidakpedulian masyarakat/pengguna layanan	eksternal	C	Pencapaian indikator yang tidak maksimal (LPP, IDG, IPG dan Nilai Kabupaten Layak Anak)	1. Kepala Daerah 2. Masyarakat 3. OPD Terkait

		Nilai Kabupaten Layak Anak	Terdapat risiko ketidakpahaman dan juga ketidakpedulian masyarakat/ pengguna layanan terhadap substansi teknis layanan perangkat daerah sehingga dapat mengakibatkan pencapaian indikator yang tidak maksimal (LPP, IDG, IPG dan Nilai Kabupaten Layak Anak)		Kepala Daerah	Ketidakpahaman dan ketidakpedulian masyarakat/pengguna layanan	eksternal	C	Pencapaian indikator yang tidak maksimal (LPP, IDG, IPG dan Nilai Kabupaten Layak Anak)	1. Kepala Daerah 2. Masyarakat 3. OPD Terkait
	Sasaran 11									
	Meningkatnya pengendalian pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Terdapat risiko ketidakpahaman dan juga ketidakpedulian masyarakat/ pengguna layanan terhadap substansi teknis layanan perangkat daerah sehingga dapat mengakibatkan pencapaian indikator yang tidak maksimal (LPP, IDG, IPG dan Nilai Kabupaten Layak Anak)		Kepala Daerah	Ketidakpahaman dan ketidakpedulian masyarakat/pengguna layanan	eksternal	C	Pencapaian indikator yang tidak maksimal (LPP, IDG, IPG dan Nilai Kabupaten Layak Anak)	1. Kepala Daerah 2. Masyarakat 3. OPD Terkait

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis

Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom e diisi dengan Kode risiko

Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine* , dan *Material*

Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko

Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

## Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten BANYUMAS, Provinsi Jawa Tengah
Nama OPD	: DPPKBP3A Kabupaten Banyumas
Tahun Penilaian	: 2020
Periode yang dinilai	: Periode Renstra (Tahun 2018-2023)
Tujuan Strategis	: Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
OPD yang Dinilai	: DPPKBP3A Kabupaten Banyumas

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Tujuan: Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk									
	Sasaran Strategis OPD :									
	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	OPD belum maksimal dalam mengelola sumberdaya SDM dan Efektivitas kinerjanya sehingga dapat berakibat pada pencapaian indikator yang tidak maksimal (LPP, IDG, IPG dan Nilai Kabupaten Layak Anak)		Kepala DPPKBP3A	OPD belum maksimal dalam pengelolaan SDM dan Efektivitas kinerja	Internal	C	Pencapaian Indikator yang tidak maksimal (LPP, IDG, IPG dan Nilai Kabupaten Layak Anak)	Kepala DPPKBP3A Kabupaten Banyumas; OPD; Masyarakat
2	Tujuan: Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak									
	Sasaran Strategis OPD :									
	Meningkatkan kualitas pembangunan perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	OPD belum maksimal dalam mengelola sumberdaya SDM dan Efektivitas kinerjanya sehingga dapat berakibat pada pencapaian indikator yang tidak maksimal (LPP, IDG, IPG dan Nilai Kabupaten Layak Anak)		Kepala DPPKBP3A	OPD belum maksimal dalam pengelolaan SDM dan Efektivitas kinerja	Internal	C	Pencapaian Indikator yang tidak maksimal (LPP, IDG, IPG dan Nilai Kabupaten Layak Anak)	Kepala DPPKBP3A Kabupaten Banyumas; OPD; Masyarakat

	Meningkatkan kualitas pemberdayaan perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	OPD belum maksimal dalam mengelola sumberdaya SDM dan Efektivitas kerjanya sehingga dapat berakibat pada pencapaian indikator yang tidak maksimal (LPP, IDG, IPG dan Nilai Kabupaten Layak Anak)		Kepala DPPKBP3A	OPD belum maksimal dalam pengelolaan SDM dan Efektivitas kinerja	Internal	C	Pencapaian Indikator yang tidak maksimal (LPP, IDG, IPG dan Nilai Kabupaten Layak Anak)	Kepala DPPKBP3A Kabupaten Banyumas; OPD; Masyarakat
	Meningkatkan kualitas perlindungan anak	Nilai Kabupaten Layak Anak	OPD belum maksimal dalam mengelola sumberdaya SDM dan Efektivitas kerjanya sehingga dapat berakibat pada pencapaian indikator yang tidak maksimal (LPP, IDG, IPG dan Nilai Kabupaten Layak Anak)		Kepala DPPKBP3A	OPD belum maksimal dalam pengelolaan SDM dan Efektivitas kinerja	Internal	C	Pencapaian Indikator yang tidak maksimal (LPP, IDG, IPG dan Nilai Kabupaten Layak Anak)	Kepala DPPKBP3A Kabupaten Banyumas; OPD; Masyarakat

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis

Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom e diisi dengan Kode risiko

Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine* , dan *Material*

Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko

Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

## Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Operasional OPD

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten  
 Nama OPD : DPPKBP3A Kabupaten Banyumas  
 Tahun Penilaian : 2020  
 Periode yang dinilai : 2021  
 Tujuan Strategis : Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk  
 Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak  
 Sasaran strategis OPD : Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk  
 Meningkatkan kualitas pembangunan perempuan  
 Meningkatkan kualitas pemberdayaan perempuan  
 Meningkatkan kualitas perlindungan anak  
 Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
 OPD yang Dinilai : DPPKBP3A Kabupaten Banyumas

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)			Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kelembagaan PUG	Perencanaan	Kurangnya pemahaman OPD terkait PUG sehingga belum terwujudnya proses perencanaan penganggaran yang responsif gender		Bidang	Kurangnya pemahaman OPD	Eksternal	C	Perencanaan penganggaran belum responsif Gender	Pemerintah Daerah; Masyarakat; Kepala DPPKBP3A; Pejabat Teknis terkait.
			Pelaksanaan	Masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait Pengarusutamaan Gender (PUG) dan belum maksimalnya komitmen/ dukungan kelembagaan pemerintah dalam program PUG sehingga pencapaian indikator dalam pelebagaan PUG tidak maksimal		Bidang	Masyarakat kurang memahami Pengarusutamaan Gender (PUG)	Internal	C	Pencapaian target indikator jumlah kelembagaan PUG tidak maksimal	Pemerintah Daerah; Masyarakat; Kepala DPPKBP3A; Pejabat Teknis terkait.
2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Organisasi Perempuan	Pelaksanaan	Belum tertibnya administrasi dalam pengelolaan organisasi kemasyarakatan (perempuan) sehingga eksistensi kelembagaan perempuan tidak berkembang secara dinamis		Bidang	Belum tertib administrasi pengelolaan organisasi perempuan	Internal	C	Keberadaan kelembagaan perempuan statis	Pemerintah Daerah; Masyarakat; Kepala DPPKBP3A; Pejabat Teknis terkait.
3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang tersedia		Masih terbatasnya tenaga fasilitator dan belum terbangunnya kreatifitas sehingga berdampak pada masih terbatasnya lembaga layanan pemberdayaan perempuan		Bidang	Terbatasnya Tenaga Fasilitator dan belum terbangunnya kreatifitas	Eksternal	C	Terbatasnya layanan pemberdayaan perempuan yang tersedia	Pemerintah Daerah; Masyarakat; Kepala DPPKBP3A; Pejabat Teknis terkait.
4	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah penanganan kasus kekerasan perempuan yang sesuai SOP; 2. Jumlah pendampingan litigasi; 3. Jumlah pendampingan non litigasi	Pelaksanaan	Terbatasnya tenaga ahli/ pendamping dalam penanganan kasus yang dapat berakibat tidak maksimalnya pelayanan penanganan kasus		Bidang	Terbatasnya tenaga ahli/ pendamping dalam penanganan kasus	Internal	C	Pelayanan penanganan kasus tidak maksimal	Pemerintah Daerah; Masyarakat; Kepala DPPKBP3A; Pejabat Teknis terkait.

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)			Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
5	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	1. Jumlah kasus kekerasan perempuan; 2. Jumlah pengaduan yang ditangani.		Kerentanan ekonomi dan kondisi sosial masyarakat yang belum mapan yang menyebabkan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan masih tinggi		Bidang	Kerentanan ekonomi dan kondisi sosial masyarakat yang belum mapan	Eksternal	C	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan masih tinggi	Pemerintah Daerah; Masyarakat; Kepala DPPKBP3A; Pejabat Teknis terkait.
6	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan perlindungan perempuan		Terbatasnya SDM yang berkompetensi dalam pelayanan kasus sehingga dapat berdampak pada menurunnya jumlah dan kemampuan layanan terhadap perlindungan perempuan		Bidang	Terbatasnya SDM yang berkompetensi dalam pelayanan kasus	Internal	C	Menurunnya jumlah dan kemampuan layanan terhadap perlindungan perempuan	Pemerintah Daerah; Masyarakat; Kepala DPPKBP3A; Pejabat Teknis terkait.
7	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan peningkatan kualitas hidup keluarga		Masih tingginya angka ibu hamil yang rentan karena fisik dan nutrisinya sehingga berdampak pada kesehatan ibu dan bayinya		Bidang	Masih tingginya angka ibu hamil yang rentan karena fisik dan nutrisinya	Eksternal	C	Kesehatan Ibu hamil dan bayinya mengawatirkan	Pemerintah Daerah; Masyarakat; Kepala DPPKBP3A; Pejabat Teknis terkait.
				Masih terbatasnya pengetahuan dan motivasi keluarga dalam kesetaraan gender (KG) dan hak anak yang menyebabkan kualitas kehidupan keluarga masih rendah		Bidang	Masih terbatasnya pengetahuan dan motivasi keluarga dalam kesetaraan gender (KG) dan hak anak	Eksternal	C	Kualitas kehidupan keluarga masih rendah	Pemerintah Daerah; Masyarakat; Kepala DPPKBP3A; Pejabat Teknis terkait.
8	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Jumlah OPD yang memanfaatkan Data Pilah Gender dan Anak		Terbatasnya personil yang menguasai teknologi informasi yang berdampak pada tidak maksimalnya pengelolaan data Gender dan Anak		Bidang	Terbatasnya personil yang menguasai teknologi informasi	Internal	C	Pengelolaan data Gender dan Anak tidak maksimal	Pemerintah Daerah; Masyarakat; Kepala DPPKBP3A; Pejabat Teknis terkait.
9	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan fasilitasi kabupaten dan kecamatan layak anak		Minimnya informasi terkait Pemenuhan Hak-hak Anak di masyarakat, yang berdampak pada minimnya kelembagaan anak		Bidang	Minimnya informasi terkait Pemenuhan Hak-hak Anak di masyarakat	Eksternal	C	Minimnya kelembagaan anak	Pemerintah Daerah; Masyarakat; Kepala DPPKBP3A; Pejabat Teknis terkait.
				Kurangnya kompetensi teknis bagi pengelola kegiatan anak yang dapat berdampak pada pencapaian kerjanya		Bidang	Kurangnya kompetensi teknis bagi pengelola kegiatan anak	Internal	C	Pencapaian kinerja tidak maksimal	Pemerintah Daerah; Masyarakat; Kepala DPPKBP3A; Pejabat Teknis terkait.
10	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah kasus anak yang ditangani; 2. Jumlah kasus anak perempuan yang ditangani.		Kesulitan ekonomi dan rendahnya pengetahuan terkait hak-hak anak yang berdampak pada masih tingginya kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap anak		Bidang	Kesulitan ekonomi dan rendahnya pengetahuan terkait hak-hak anak	Eksternal	C	Masih tingginya kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap anak	Pemerintah Daerah; Masyarakat; Kepala DPPKBP3A; Pejabat Teknis terkait.
11	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	1. Jumlah kelompok masyarakat peduli KB dalam program KKBPK; 2. Jumlah kelompok PLKB yang melaporkan data pengendalian penduduk.		Belum tumbuhnya kesadaran dan inisiatif dari PUS tentang pengetahuan KB sehingga animo untuk ber-KB belum optimal		Bidang	Belum tumbuhnya kesadaran dan inisiatif dari PUS tentang pengetahuan KB	Eksternal	C	Animo untuk ber-KB belum optimal	Pemerintah Daerah; Masyarakat; Kepala DPPKBP3A; Pejabat Teknis terkait.

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)			Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
				Wilayah yang sulit dijangkau oleh sinyal internet berdampak pada kualitas dan kuantitas laporan data yang terganggu dan tidak tepat waktu		Bidang	Wilayah yang sulit dijangkau oleh sinyal internet	Eksternal	C	Kualitas dan kuantitas laporan data yang terganggu dan tidak tepat waktu	Pemerintah Daerah; Masyarakat; Kepala DPPKBP3A; Pejabat Teknis terkait.
12	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah informasi data mikro keluarga setiap desa yang dilaporkan		Terbatasnya kompetensi personil yang mengelola data kependudukan sehingga pengelolaan data pengendalian penduduk tidak maksimal		Bidang	Terbatasnya kompetensi personil yang mengelola data kependudukan	Internal	C	Pengelolaan data pengendalian penduduk tidak maksimal	Pemerintah Daerah; Masyarakat; Kepala DPPKBP3A; Pejabat Teknis terkait.
			Pelaksanaan	Tidak maksimalnya komitmen petugas lapangan dalam menjaring dan mengumpulkan data yang dibutuhkan sehingga data sering terlambat masuk		Bidang	Tidak maksimalnya komitmen petugas lapangan dalam menjaring dan mengumpulkan data yang dibutuhkan	Internal	C	Data sering terlambat masuk	Pemerintah Daerah; Masyarakat; Kepala DPPKBP3A; Pejabat Teknis terkait.
13	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1. Jenis dukungan manajemen dalam program KKBPK; 2. Frekuensi Penyuluhan oleh PLKB/PKB.		Cara pandang dan berpikir yang berbeda terkait program KKBPK masih tinggi sehingga efektifitas dalam perekrutan akseptor KB baru terus menurun yang berdampak pada menurunnya frekuensi penyuluhan		Bidang	Cara pandang dan berpikir yang berbeda terkait program KKBPK masih tinggi sehingga efektifitas dalam perekrutan akseptor KB baru terus menurun	Eksternal	C	Menurunnya frekuensi penyuluhan	Pemerintah Daerah; Masyarakat; Kepala DPPKBP3A; Pejabat Teknis terkait.
				Peran dan komitmen manajemen dalam pengelolaan program KB belum efektif dan inovatif sehingga antusiasme dalam ber KB menurun		Bidang	Peran dan komitmen manajemen dalam pengelolaan program KB belum efektif dan inovatif	Internal	C	Antusiasme dalam ber KB menurun	Pemerintah Daerah; Masyarakat; Kepala DPPKBP3A; Pejabat Teknis terkait.
14	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Petugas Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	Pelaksanaan	Komitmen pengelola kegiatan yang belum efektif dalam menyokong Petugas Lapangan sehingga keberhasilan dalam mencetak kader-kader KB belum maksimal		Bidang	Komitmen pengelola kegiatan yang belum efektif dalam menyokong Petugas Lapangan	Internal	C	Keberhasilan dalam mencetak kader-kader KB belum maksimal	Pemerintah Daerah; Masyarakat; Kepala DPPKBP3A; Pejabat Teknis terkait.
15	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah Balai Penyuluhan KB yang mendapatkan sarana dan prasarana penunjang bagi PKB/PLKB ; 2. Jumlah anggota kelompok kegiatan (BKB,BKR,BKL) yang berstatus PUS; 3. Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun; 4. Jumlah faskes yang tercukupi alat dan obat kontrasepsinya; 5. Jumlah Peserta KB Aktif; 6. Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS); 7. Jumlah kelembagaan kelompok kesehatan reproduksi remaja (PIK-R dll).	Pelaksanaan	Kompetensi Pengelola pengadaan barang belum maksimal sehingga proses pengadaan barang untuk sarana penunjang tidak berjalan efektif		Bidang	Kompetensi Pengelola pengadaan barang belum maksimal	Internal	C	Proses pengadaan barang untuk sarana penunjang tidak berjalan efektif	Pemerintah Daerah; Masyarakat; Kepala DPPKBP3A; Pejabat Teknis terkait.
			Pelaksanaan	Pengelola kegiatan KKR (BKB,BKR,BKL) belum maksimal dalam mengelola kegiatannya sehingga progress kemajuan dan jumlah kelompok tidak berkembang secara signifikan		Bidang	Pengelola kegiatan KKR (BKB,BKR,BKL) belum maksimal dalam mengelola kegiatannya	Internal	C	Progress kemajuan dan jumlah kelompok tidak berkembang secara signifikan	Pemerintah Daerah; Masyarakat; Kepala DPPKBP3A; Pejabat Teknis terkait.
			Pelaksanaan	Petugas dan pengelola pendistribusian alokon tidak secara tertib dalam merencanakan dan melaksanakan pendistribusian, serta kurangnya komunikasi dengan faskes yang berdampak pada terganggunya stok dan pelayanan KB tidak maksimal		Bidang	Petugas dan pengelola pendistribusian alokon tidak secara tertib dalam merencanakan dan melaksanakan pendistribusian, serta kurangnya komunikasi dengan faskes	Internal	C	Terganggunya stok dan pelayanan KB tidak maksimal	Pemerintah Daerah; Masyarakat; Kepala DPPKBP3A; Pejabat Teknis terkait.
			Pelaksanaan	Sosialisasi dalam pelayanan program KB belum berjalan maksimal sehingga berdampak pada menurunnya angka keikutsertaan KB di masyarakat		Bidang	Sosialisasi dalam pelayanan program KB belum berjalan maksimal	Internal	C	Menurunnya angka keikutsertaan KB di masyarakat	Pemerintah Daerah; Masyarakat; Kepala DPPKBP3A; Pejabat Teknis terkait.

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)			Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
			Pelaksanaan	Keseriusan pengelola kegiatan dan keterlibatan pengurus organisasi dalam mendukung program KB tidak maksimal yang berdampak pada monotonnya kegiatan remaja yang peduli KB dan tidak berkembangnya jumlah organisasi		Bidang	Keseriusan pengelola kegiatan dan keterlibatan pengurus organisasi dalam mendukung program KB tidak maksimal	Internal	C	Monotonnya kegiatan remaja yang peduli KB dan tidak berkembangnya jumlah organisasi	Pemerintah Daerah; Masyarakat; Kepala DPPKBP3A; Pejabat Teknis terkait.
16	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	1. Jumlah OPD yang berperan aktif dalam kampung KB; 2. Jumlah Kampung KB yang aktif kegiatannya.	Pelaksanaan	Pengelolaan Kampung KB belum maksimal sehingga kegiatan dan geliat Kampung KB tidak berkembang ke arah yang lebih baik		Bidang	Pengelolaan Kampung KB belum maksimal	Internal	C	Kegiatan dan geliat Kampung KB tidak berkembang ke arah yang lebih baik	Pemerintah Daerah; Masyarakat; Kepala DPPKBP3A; Pejabat Teknis terkait.
17	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1. Jumlah Pertemuan Kelompok UPPKS; 2. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera(PPKS) di setiap kecamatan	Pelaksanaan	Pengelolaan pembangunan keluarga belum dilaksanakan secara maksimal dan berkelanjutan sehingga kelompok-kelompok kegiatan tidak berkembang baik secara jumlah maupun kompetensinya		Bidang	Pengelolaan pembangunan keluarga belum dilaksanakan secara maksimal dan berkelanjutan	Internal	C	Kelompok-kelompok kegiatan tidak berkembang baik secara jumlah maupun kompetensinya	Pemerintah Daerah; Masyarakat; Kepala DPPKBP3A; Pejabat Teknis terkait.
			Pelaksanaan	Petugas maupun Pengelola kegiatan belum menguasai substansi secara mendasar sehingga pembentukan kelompok-kelompok kegiatan tidak berkembang secara dinamis		Bidang	Petugas maupun Pengelola kegiatan belum menguasai substansi secara mendasar	Internal	C	Pembentukan kelompok-kelompok kegiatan tidak berkembang secara dinamis	Pemerintah Daerah; Masyarakat; Kepala DPPKBP3A; Pejabat Teknis terkait.
			Perencanaan	Minimnya alokasi dana dalam kegiatan yang menyulitkan pergerakan dan pengembangan kegiatan		Bidang	Minimnya alokasi dana dalam kegiatan	Internal	C	Menyulitkan pergerakan dan pengembangan kegiatan	Pemerintah Daerah; Masyarakat; Kepala DPPKBP3A; Pejabat Teknis terkait.

**Keterangan**

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan kegiatan, tujuan kegiatan, dan sasaran kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKA SKPD Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan/sasaran kegiatan

Kolom d diisi dengan tahapan kegiatan

Kolom e diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom f diisi dengan Kode risiko

Kolom g diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom h diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine* , dan *Material*

Kolom i diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom j diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan penyebab risiko

Kolom k diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kolom l diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

## FORMULIR KERTAS KERJA HASIL ANALISIS RISIKO

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas				
Tahun Penilaian	: 2020				
Tujuan Strategis	: Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak				
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak *)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
<b>I Risiko Strategis Pemerintah Daerah</b>					
1	Terdapat risiko ketidakpahaman dan juga ketidakpedulian masyarakat/ pengguna layanan terhadap substansi teknis layanan perangkat daerah sehingga dapat mengakibatkan pencapaian indikator yang tidak maksimal (LPP, IDG, IPG dan Nilai Kabupaten Layak Anak)		4	3	12
<b>II Risiko Strategis OPD</b>					
1	OPD belum maksimal dalam mengelola sumberdaya SDM dan Efektivitas kinerjanya sehingga dapat berakibat pada pencapaian indikator yang tidak maksimal (LPP, IDG, IPG dan Nilai Kabupaten Layak Anak)		4	3	12
<b>III Risiko Operasional OPD</b>					
<b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>					
1	Kurangnya pemahaman OPD terkait PUG sehingga belum terwujudnya proses perencanaan penganggaran yang responsif gender		3	3	9
2	Masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait Pengarusutamaan Gender (PUG) dan belum maksimalnya komitmen/ dukungan kelembagaan pemerintah dalam program PUG sehingga pencapaian indikator dalam pelembagaan PUG tidak maksimal		4	3	12
<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota</b>					
1	Belum tertibnya administrasi dalam pengelolaan organisasi kemasyarakatan (perempuan) sehingga eksistensi kelembagaan perempuan tidak berkembang secara dinamis		3	3	9
<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>					
1	Masih terbatasnya tenaga fasilitator dan belum terbangunnya kreatifitas sehingga berdampak pada masih terbatasnya lembaga layanan pemberdayaan perempuan		3	3	9
<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>					
1	Terbatasnya tenaga ahli/ pendamping dalam penanganan kasus yang dapat berakibat tidak maksimalnya pelayanan penanganan kasus		4	3	12
<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>					
1	Kerentanan ekonomi dan kondisi sosial masyarakat yang belum mapan yang menyebabkan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan masih tinggi		4	3	12
<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>					
1	Terbatasnya SDM yang berkompetensi dalam pelayanan kasus sehingga dapat berdampak pada menurunnya jumlah dan kemampuan layanan terhadap perlindungan perempuan		3	3	9

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak *)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
	<b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>				
1	Masih tingginya angka ibu hamil yang rentan karena fisik dan nutrisinya sehingga berdampak pada kesehatan ibu dan bayinya		4	3	12
2	Masih terbatasnya pengetahuan dan motivasi keluarga dalam kesetaraan gender (KG) dan hak anak yang menyebabkan kualitas kehidupan keluarga masih rendah		3	3	9
	<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota</b>				
1	Terbatasnya personil yang menguasai teknologi informasi yang berdampak pada tidak maksimalnya pengelolaan data Gender dan Anak		3	3	9
	<b>Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>				
1	Minimnya informasi terkait Pemenuhan Hak-hak Anak di masyarakat, yang berdampak pada minimnya kelembagaan anak		3	3	9
2	Kurangnya kompetensi teknis bagi pengelola kegiatan anak yang dapat berdampak pada pencapaian kinerjanya		4	3	12
	<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>				
1	Kesulitan ekonomi dan rendahnya pengetahuan terkait hak-hak anak yang berdampak pada masih tingginya kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap anak		4	3	12
	<b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>				
1	Belum tumbuhnya kesadaran dan inisiatif dari PUS tentang pengetahuan KB sehingga animo untuk ber-KB belum optimal		3	3	9
2	Wilayah yang sulit dijangkau oleh sinyal internet berdampak pada kualitas dan kuantitas laporan data yang terganggu dan tidak tepat waktu		4	2	8
	<b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota</b>				
1	Terbatasnya kompetensi personil yang mengelola data kependudukan sehingga pengelolaan data pengendalian penduduk tidak maksimal		3	3	9
2	Tidak maksimalnya komitmen petugas lapangan dalam menjangkau dan mengumpulkan data yang dibutuhkan sehingga data sering terlambat masuk		3	3	9
	<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>				0
1	Cara pandang dan berpikir yang berbeda terkait program KKBPK masih tinggi sehingga efektifitas dalam perekrutan akseptor KB baru terus menurun yang berdampak pada menurunnya frekuensi penyuluhan		3	3	9
2	Peran dan komitmen manajemen dalam pengelolaan program KB belum efektif dan inovatif sehingga antusiasme dalam ber KB menurun		3	3	9
	<b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>				
1	Komitmen pengelola kegiatan yang belum efektif dalam menyokong Petugas Lapangan sehingga keberhasilan dalam mencetak kader-kader KB belum maksimal		3	3	9
	<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota</b>				

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak *)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
1	Kompetensi Pengelola pengadaan barang belum maksimal sehingga proses pengadaan barang untuk sarana penunjang tidak berjalan efektif		3	3	9
2	Pengelola kegiatan KKR (BKB,BKR,BKL) belum maksimal dalam mengelola kegiatannya sehingga progress kemajuan dan jumlah kelompok tidak berkembang secara signifikan		3	3	9
3	Petugas dan pengelola pendistribusian alokon tidak secara tertib dalam merencanakan dan melaksanakan pendistribusian, serta kurangnya komunikasi dengan faskes yang berdampak pada terganggunya stok dan pelayanan KB tidak maksimal		3	2	6
4	Sosialisasi dalam pelayanan program KB belum berjalan maksimal sehingga berdampak pada menurunnya angka keikutsertaan KB di masyarakat		3	2	6
5	Keseriusan pengelola kegiatan dan keterlibatan pengurus organisasi dalam mendukung program KB tidak maksimal yang berdampak pada monotonnya kegiatan remaja yang peduli KB dan tidak berkembangnya jumlah organisasi		3	2	6
<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>					
1	Pengelolaan Kampung KB belum maksimal sehingga kegiatan dan geliat Kampung KB tidak berkembang ke arah yang lebih baik		3	3	9
<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>					
1	Pengelolaan pembangunan keluarga belum dilaksanakan secara maksimal dan berkelanjutan sehingga kelompok-kelompok kegiatan tidak berkembang baik secara jumlah maupun kompetensinya		3	3	9
2	Petugas maupun Pengelola kegiatan belum menguasai substansi secara mendasar sehingga pembentukan kelompok-kelompok kegiatan tidak berkembang secara dinamis		3	3	9
3	Minimnya alokasi dana dalam kegiatan yang menyulitkan pergerakan dan pengembangan kegiatan		3	3	9

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi sesuai lampiran 6a dan 6b

Kolom c diisi dengan kode risiko sesuai lampiran 6a dan 6b

Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala dampak yang diberikan peserta diskusi

Kolom e diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala kemungkinan yang diberikan peserta diskusi

Kolom f diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan

**FORMULIR KERTAS KERJA  
DAFTAR RISIKO PRIORITAS**

<b>Nama Pemda</b> : Pemerintah Kabupaten Banyumas <b>Tahun Penilaian</b> : 2020 <b>Tujuan Strategis</b> : Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak <b>Urusan Pemerintahan</b> : Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
<b>I Risiko Strategis Pemda</b>						
1	Terdapat risiko ketidakpahaman dan juga ketidakpedulian masyarakat/ pengguna layanan terhadap substansi teknis layanan perangkat daerah sehingga dapat mengakibatkan pencapaian indikator yang tidak maksimal (LPP, IDG, IPG dan Nilai Kabupaten Layak Anak)		12	Kepala Daerah	Ketidakpahaman dan ketidakpedulian masyarakat/pengguna layanan	Pencapaian indikator yang tidak maksimal (LPP, IDG, IPG dan Nilai Kabupaten Layak Anak)
<b>II Risiko Strategis OPD</b>						
1	OPD belum maksimal dalam mengelola sumberdaya SDM dan Efektivitas kinerjanya sehingga dapat berakibat pada pencapaian indikator yang tidak maksimal (LPP, IDG, IPG dan Nilai Kabupaten Layak Anak)		12	Ka. DPPKBP 3A	OPD belum maksimal dalam pengelolaan SDM dan Efektivitas kinerja	Pencapaian Indikator yang tidak maksimal (LPP, IDG, IPG dan Nilai Kabupaten Layak Anak)
<b>III Risiko Operasional OPD</b>						
<b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>						
1	Kurangnya pemahaman OPD terkait PUG sehingga belum terwujudnya proses perencanaan penganggaran yang responsif gender		9	Bidang	Kurangnya pemahaman OPD	Perencanaan penganggaran belum responsif Gender
2	Masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait Pengarusutamaan Gender (PUG) dan belum maksimalnya komitmen/ dukungan kelembagaan pemerintah dalam program PUG sehingga pencapaian indikator dalam pelembagaan PUG tidak maksimal		12	Bidang	Masyarakat kurang memahami Pengarusutamaan Gender (PUG)	Pencapaian target indikator jumlah kelembagaan PUG tidak maksimal
<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota</b>						
1	Belum tertibnya administrasi dalam pengelolaan organisasi kemasyarakatan (perempuan) sehingga eksistensi kelembagaan perempuan tidak berkembang secara dinamis		9	Bidang	Belum tertib administrasi pengelolaan organisasi perempuan	Keberadaan kelembagaan perempuan statis
<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>						

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
1	Masih terbatasnya tenaga fasilitator dan belum terbangunnya kreatifitas sehingga berdampak pada masih terbatasnya lembaga layanan pemberdayaan perempuan		9	Bidang	Terbatasnya Tenaga Fasilitator dan belum terbangunnya kreatifitas	Terbatasnya layanan pemberdayaan perempuan yang tersedia
	<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>					
1	Terbatasnya tenaga ahli/ pendamping dalam penanganan kasus yang dapat berakibat tidak maksimalnya pelayanan penanganan kasus		12	Bidang	Terbatasnya tenaga ahli/ pendamping dalam penanganan kasus	Pelayanan penanganan kasus tidak maksimal
	<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>					
1	Kerentanan ekonomi dan kondisi sosial masyarakat yang belum mapan yang menyebabkan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan masih tinggi		12	Bidang	Kerentanan ekonomi dan kondisi sosial masyarakat yang belum mapan	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan masih tinggi
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>					
1	Terbatasnya SDM yang berkompetensi dalam pelayanan kasus sehingga dapat berdampak pada menurunnya jumlah dan kemampuan layanan terhadap perlindungan perempuan		9	Bidang	Terbatasnya SDM yang berkompetensi dalam pelayanan kasus	Menurunnya jumlah dan kemampuan layanan terhadap perlindungan perempuan
	<b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>					
1	Masih tingginya angka ibu hamil yang rentan karena fisik dan nutrisinya sehingga berdampak pada kesehatan ibu dan bayinya		12	Bidang	Masih tingginya angka ibu hamil yang rentan karena fisik dan nutrisinya	Kesehatan Ibu hamil dan bayinya mengawatirkan
2	Masih terbatasnya pengetahuan dan motivasi keluarga dalam kesetaraan gender (KG) dan hak anak yang menyebabkan kualitas kehidupan keluarga masih rendah		9	Bidang	Masih terbatasnya pengetahuan dan motivasi keluarga dalam kesetaraan gender (KG) dan hak anak	Kualitas kehidupan keluarga masih rendah
	<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota</b>					
1	Terbatasnya personil yang menguasai teknologi informasi yang berdampak pada tidak maksimalnya pengelolaan data Gender dan Anak		9	Bidang	Terbatasnya personil yang menguasai teknologi informasi	Pengelolaan data Gender dan Anak tidak maksimal
	<b>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>					
1	Minimnya informasi terkait Pemenuhan Hak-hak Anak di masyarakat, yang berdampak pada minimnya kelembagaan anak		9	Bidang	Minimnya informasi terkait Pemenuhan Hak-hak Anak di masyarakat	Minimnya kelembagaan anak

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
2	Kurangnya kompetensi teknis bagi pengelola kegiatan anak yang dapat berdampak pada pencapaian kerjanya		12	Bidang	Kurangnya kompetensi teknis bagi pengelola kegiatan anak	Pencapaian kinerja tidak maksimal
	<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>					
1	Kesulitan ekonomi dan rendahnya pengetahuan terkait hak-hak anak yang berdampak pada masih tingginya kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap anak		12	Bidang	Kesulitan ekonomi dan rendahnya pengetahuan terkait hak-hak anak	Masih tingginya kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap anak
	<b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>					
1	Belum tumbuhnya kesadaran dan inisiatif dari PUS tentang pengetahuan KB sehingga animo untuk ber-KB belum optimal		9	Bidang	Belum tumbuhnya kesadaran dan inisiatif dari PUS tentang pengetahuan KB	Animo untuk ber-KB belum optimal
2	Wilayah yang sulit dijangkau oleh sinyal internet berdampak pada kualitas dan kuantitas laporan data yang terganggu dan tidak tepat waktu		8	Bidang	Wilayah yang sulit dijangkau oleh sinyal internet	Kualitas dan kuantitas laporan data yang terganggu dan tidak tepat waktu
	<b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota</b>					
1	Terbatasnya kompetensi personil yang mengelola data kependudukan sehingga pengelolaan data pengendalian penduduk tidak maksimal		9	Bidang	Terbatasnya kompetensi personil yang mengelola data kependudukan	Pengelolaan data pengendalian penduduk tidak maksimal
2	Tidak maksimalnya komitmen petugas lapangan dalam menjangkau dan mengumpulkan data yang dibutuhkan sehingga data sering terlambat masuk		9	Bidang	Tidak maksimalnya komitmen petugas lapangan dalam menjangkau dan mengumpulkan data yang dibutuhkan	Data sering terlambat masuk
	<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>					
1	Cara pandang dan berpikir yang berbeda terkait program KKBPK masih tinggi sehingga efektifitas dalam perekrutan akseptor KB baru terus menurun yang berdampak pada menurunnya frekuensi penyuluhan		9	Bidang	Cara pandang dan berpikir yang berbeda terkait program KKBPK masih tinggi sehingga efektifitas dalam perekrutan akseptor KB baru terus menurun	Menurunnya frekuensi penyuluhan
2	Peran dan komitmen manajemen dalam pengelolaan program KB belum efektif dan inovatif sehingga antusiasme dalam ber KB menurun		9	Bidang	Peran dan komitmen manajemen dalam pengelolaan program KB belum efektif dan inovatif	Antusiasme dalam ber KB menurun
	<b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>					

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
1	Komitmen pengelola kegiatan yang belum efektif dalam menyokong Petugas Lapangan sehingga keberhasilan dalam mencetak kader-kader KB belum maksimal		9	Bidang	Komitmen pengelola kegiatan yang belum efektif dalam menyokong Petugas Lapangan	Keberhasilan dalam mencetak kader-kader KB belum maksimal
	<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota</b>					
1	Kompetensi Pengelola pengadaan barang belum maksimal sehingga proses pengadaan barang untuk sarana penunjang tidak berjalan efektif		9	Bidang	Kompetensi Pengelola pengadaan barang belum maksimal	Proses pengadaan barang untuk sarana penunjang tidak berjalan efektif
2	Pengelola kegiatan KKR (BKB,BKR,BKL) belum maksimal dalam mengelola kegiatannya sehingga progress kemajuan dan jumlah kelompok tidak berkembang secara signifikan		9	Bidang	Pengelola kegiatan KKR (BKB,BKR,BKL) belum maksimal dalam mengelola kegiatannya	Progress kemajuan dan jumlah kelompok tidak berkembang secara signifikan
3	Petugas dan pengelola pendistribusian alokon tidak secara tertib dalam merencanakan dan melaksanakan pendistribusian, serta kurangnya komunikasi dengan faskes yang berdampak pada terganggunya stok dan pelayanan KB tidak maksimal		6	Bidang	Petugas dan pengelola pendistribusian alokon tidak secara tertib dalam merencanakan dan melaksanakan pendistribusian, serta kurangnya komunikasi dengan faskes	Terganggunya stok dan pelayanan KB tidak maksimal
4	Sosialisasi dalam pelayanan program KB belum berjalan maksimal sehingga berdampak pada menurunnya angka keikutsertaan KB di masyarakat		6	Bidang	Sosialisasi dalam pelayanan program KB belum berjalan maksimal	Menurunnya angka keikutsertaan KB di masyarakat
5	Keseriusan pengelola kegiatan dan keterlibatan pengurus organisasi dalam mendukung program KB tidak maksimal yang berdampak pada monotonnya kegiatan remaja yang peduli KB dan tidak berkembangnya jumlah organisasi		6	Bidang	Keseriusan pengelola kegiatan dan keterlibatan pengurus organisasi dalam mendukung program KB tidak maksimal	Monotonnya kegiatan remaja yang peduli KB dan tidak berkembangnya jumlah organisasi
	<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>					
1	Pengelolaan Kampung KB belum maksimal sehingga kegiatan dan geliat Kampung KB tidak berkembang ke arah yang lebih baik		9	Bidang	Pengelolaan Kampung KB belum maksimal	Kegiatan dan geliat Kampung KB tidak berkembang ke arah yang lebih baik
	<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>					
1	Pengelolaan pembangunan keluarga belum dilaksanakan secara maksimal dan berkelanjutan sehingga kelompok-kelompok kegiatan tidak berkembang baik secara jumlah maupun kompetensinya		9	Bidang	Pengelolaan pembangunan keluarga belum dilaksanakan secara maksimal dan berkelanjutan	Kelompok-kelompok kegiatan tidak berkembang baik secara jumlah maupun kompetensinya

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
2	Petugas maupun Pengelola kegiatan belum menguasai substansi secara mendasar sehingga pembentukan kelompok-kelompok kegiatan tidak berkembang secara dinamis		9	Bidang	Petugas maupun Pengelola kegiatan belum menguasai substansi secara mendasar	Pembentukan kelompok-kelompok kegiatan tidak berkembang secara dinamis
3	Minimnya alokasi dana dalam kegiatan yang menyulitkan pergerakan dan pengembangan kegiatan		9	Bidang	Minimnya alokasi dana dalam kegiatan	Menyulitkan pergerakan dan pengembangan kegiatan

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko prioritas

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan skala risiko (sesuai Lampiran 7)

Kolom e diisi dengan pemilik risiko sesuai Lampiran 6a dan 6b

Kolom f diisi dengan penyebab sesuai Lampiran 6a dan 6b

Kolom g diisi dengan dampak sesuai dengan Lampiran 6a dan 6b

FORMULIR KERTAS KERJA  
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Lingkungan Pengendalian

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Banyumas							
Tahun Penilaian : 2020							
No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Uraian Pengendalian yang Ada	E/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu
a	b	c	d	e	f	g	h
<b>I</b>	<b>Perwujudan Peran APIP yang Efektif</b>						
1	Kurangnya disiplin pegawai yang bersangkutan dan pengendalian dan pengawasan dari atasan langsung belum optimal.	Pembinaan secara rutin Kepala OPD dalam Apel dan Rapat Dinas	TE	Prosedur pengendalian belum dilaksanakan	Melaksanakan pembinaan secara berjenjang sesuai ketentuan pembinaan disiplin pegawai	Kepala DPPKBP3A	Triwulan IV 2021
2	Terdapat Pegawai dan/atau PPTK yang belum maksimal dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya yang telah didelegasikan/ diperintahkan	Rapat Struktural, Pembinaan rutin Pimpinan kepada PPTK/Pelaksana	TE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Monitoring dan evaluasi secara rutin dan berjenjang atas pelaksanaan tugas/kegiatan	Kepala DPPKBP3A	Triwulan IV 2021

## Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan kondisi lingkungan pengendalian yang kurang memadai

Kolom c diisi dengan pengendalian yang sudah ada/sudah dilakukan

Kolom d diisi dengan penilaian efektifitas pengendalian yang ada:

- (1) E apabila Efektif;
- (2) TE apabila Tidak Efektif.

Kolom e Diisi dengan alasan tidak efektif:

- (1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,
- (2) Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan,
- (3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas,
- (4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya

Kolom f diisi dengan perbaikan yang akan dilakukan

Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

## Formulir Kertas Kerja

## Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Mengatasi Risiko

Nama Pemda		: Pemerintah Kabupaten Banyumas						
Tahun Penilaian		: 2020						
Tujuan Strategis		: Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak						
Urusan Pemerintahan		: Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	E/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h	i
<b>I Risiko Strategis Pemda</b>								
1	Terdapat risiko ketidakpahaman dan juga ketidakpedulian masyarakat/ pengguna layanan terhadap substansi teknis layanan perangkat daerah sehingga dapat mengakibatkan pencapaian indikator yang tidak maksimal (LPP, IDG, IPG dan Nilai Kabupaten Layak Anak)		Sosialisasi Program dan kegiatan kepada OPD yang terkait dan masyarakat	TE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan permasalahan minimnya informasi substansi kedinasan kepada OPD lain yang terlibat dalam mendukung indikator	Kepala Daerah	Triwulan IV 2021
<b>II Risiko Strategis OPD</b>								
2	OPD belum maksimal dalam mengelola sumberdaya SDM dan Efektivitas kerjanya sehingga dapat berakibat pada pencapaian indikator yang tidak maksimal (LPP, IDG, IPG dan Nilai Kabupaten Layak Anak)		Sosialisasi program dan kegiatan yang berkelanjutan	TE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Monev dan pembinaan oleh unsur manajemen secara konsisten dan berkelanjutan	Kepala DPPKBP3A	Triwulan IV 2021
<b>III Risiko Operasional OPD</b>								
<b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>								
3	Masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait Pengarusutamaan Gender (PUG) dan belum maksimalnya komitmen/ dukungan kelembagaan pemerintah dalam program PUG sehingga pencapaian indikator dalam pelembagaan PUG tidak maksimal		Pembentukan Tim Focal point PUG tiap OPD	TE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Mendorong peningkatan dan efektifitas sosialisasi terkait gender pada tiap OPD dan Masyarakat	Bidang	Triwulan II 2021
<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>								

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	E/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h	i
4	Terbatasnya tenaga ahli/ pendamping dalam penanganan kasus yang dapat berakibat tidak maksimalnya pelayanan penanganan kasus		Merekrut Tenaga ahli/pendamping dari luar instansi	TE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Mendorong peningkatan kompetensi tenaga yang ada melalui IHT/ Pengembangan kompetensi secara mandiri	Bidang	Triwulan IV 2021
	<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>							
5	Kerentanan ekonomi dan kondisi sosial masyarakat yang belum mapan yang menyebabkan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan masih tinggi		Penyelenggaraan Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga	TE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Mengkoordinasikan peningkatan kesejahteraan keluarga kepada OPD terkait guna meningkatkan ekonomi masyarakat	Bidang	Triwulan II 2021
	<b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>							
6	Masih tingginya angka ibu hamil yang rentan karena fisik dan nutrisinya sehingga berdampak pada kesehatan ibu dan bayinya		Pemberian nutrisi Ibu hamil yang berisiko tinggi telah dilaksanakan	TE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Mengkoordinasikan dengan OPD terkait agar komitmen pemerintah dalam peningkatan nutrisi Ibu Hamil konsisten	Bidang	Triwulan II 2021
	<b>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>							
7	Kurangnya kompetensi teknis bagi pengelola kegiatan anak yang dapat berdampak pada pencapaian kinerjanya		Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui zoom meeting bidang terkait dan pembinaan dan pengarahan dari Pimpinan	TE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Mendorong Peningkatan kompetensi pengelola kegiatan melalui IHT dan Pengembangan Kompetensi secara mandiri	Bidang	Triwulan IV 2021
	<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>							

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	E/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h	i
8	Kesulitan ekonomi dan rendahnya pengetahuan terkait hak-hak anak yang berdampak pada masih tingginya kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap anak		Sosialisasi tentang forum anak	TE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Peningkatan pelaksanaan sosialisasi program perlindungan anak dan ekonomi kreatif bagi remaja	Bidang	Triwulan II 2021

**Keterangan**

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko prioritas

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan uraian pengendalian-pengendalian yang sudah ada/ terpasang. Agar diungkap tidak hanya nama SOP nya, Contoh SOP Pemeliharaan: Gedung dibersihkan 2 kali sehari.

Kolom e diisi dengan penilaian efektivitas pengendalian yang ada:

(1) E apabila Efektif;

(2) TE apabila Tidak Efektif.

Kolom f Diisi dengan alasan tidak efektif:

(1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,

(2) Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan,

(3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas,

(4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya

Kolom g diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan

Kolom h diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom i diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

## RANCANGAN PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Banyumas  
 Tahun Penilaian : 2020  
 Tujuan Strategis : Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk  
 Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak  
 Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Ket.
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan permasalahan minimnya informasi substansi kedinasan kepada OPD lain yang terlibat dalam mendukung indikator	Rapat/Surat	Dinas Kesehatan, Dindukcapil, Bappedalitbang, Sekretariat Daerah, BPS dan kecamatan	DPPKBP3A	Triwulan IV 2021		
2	Monev dan pembinaan oleh unsur manajemen secara konsisten dan berkelanjutan	Rapat	DPPKBP3A	Pejabat Struktural, Pelaksana, PKB/PLK B	Triwulan IV 2021		
3	Mendorong peningkatan dan efektifitas sosialisasi terkait gender pada tiap OPD dan Masyarakat	Rapat/Surat	DPPKBP3A	OPD dan Masyarakat	Triwulan IV 2021		
4	Mendorong peningkatan kompetensi tenaga yang ada melalui IHT/ Pengembangan kompetensi secara mandiri	Rapat/ Pelatihan <i>in house training</i>	DPPKBP3A	Petugas Penanganan kasus	Triwulan IV 2021		
5	Mengkoordinasikan peningkatan Kesejahteraan Keluarga kepada OPD terkait guna meningkatkan ekonomi masyarakat	Rapat/Surat	DPPKBP3A	Bappedalitbang, Dinsospermasdes, Dinas Kesehatan, Setda	Triwulan IV 2021		

No.	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Ket.
a	b	c	d	e	f	g	h
6	Mengkoordinasikan dengan OPD terkait agar komitmen pemerintah dalam peningkatan nutrisi Ibu Hamil konsisten	Rapat/Surat	DPPKBP3A	Bappeda, Dinkes . Setda	Triwulan IV 2021		
7	Mendorong Peningkatan kompetensi pengelola kegiatan melalui IHT dan Pengembangan Kompetensi secara mandiri	Rapat/ Pelatihan <i>in house training</i>	DPPKBP3A	Pejabat dan Pelaksana terkait	Triwulan IV 2021		
8	Peningkatan pelaksanaan sosialisasi program perlindungan anak dan ekonomi kreatif bagi remaja	Rapat/Surat	DPPKBP3A	OPD terkait dan Forum anak/ masyarakat	Triwulan IV 2021		

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan

Kolom c diisi dengan Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian

Kolom d diisi dengan Penyedia Informasi

Kolom e diisi dengan Penerima Informasi

Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan

Kolom g diisi dengan Realisasi Waktu Pelaksanaan

Kolom h diisi dengan Keterangan tambahan

**RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN**

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Banyumas  
 Tahun Penilaian : 2020  
 Tujuan Strategis : Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk  
 Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak  
 Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan permasalahan minimnya informasi substansi kedinasan kepada OPD lain yang terlibat dalam mendukung indikator	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala DPPKBP3A	Semester II		
2	Monev dan pembinaan oleh unsur manajemen secara konsisten dan berkelanjutan	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala DPPKBP3A	Semester II		
3	Mendorong peningkatan dan efektifitas sosialisasi terkait gender pada tiap OPD dan Masyarakat	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala DPPKBP3A	Semester I		
4	Mendorong peningkatan kompetensi tenaga yang ada melalui IHT/ Pengembangan kompetensi secara mandiri	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala DPPKBP3A	Semester II		
5	Mengkoordinasikan peningkatan Kesejahteraan Keluarga kepada OPD terkait guna meningkatkan ekonomi masyarakat	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala DPPKBP3A	Semester II		

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
6	Mengkoordinasikan dengan OPD terkait agar komitmen pemerintah dalam peningkatan nutrisi Ibu Hamil konsisten	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala DPPKBP3A	Semester II		
7	Mendorong Peningkatan kompetensi pengelola kegiatan melalui IHT dan Pengembangan Kompetensi secara mandiri	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala DPPKBP3A	Semester II		
8	Peningkatan pelaksanaan sosialisasi program perlindungan anak dan ekonomi kreatif bagi remaja	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala DPPKBP3A	Semester I		

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan

Kolom c diisi dengan Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan

Kolom d diisi dengan Penanggung Jawab Pemantauan

Kolom e diisi dengan Waktu Pelaksanaan Pemantauan

Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan

Kolom g diisi dengan Keterangan tambahan



No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket.	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket.
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
3	Masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait Pengarusutamaan Gender (PUG) dan belum maksimalnya komitmen/ dukungan kelembagaan pemerintah dalam program PUG sehingga pencapaian indikator dalam pelebagaan PUG tidak maksimal						Mendorong peningkatan dan efektifitas sosialisasi terkait gender pada tiap OPD dan Masyarakat	Triwulan II 2021		
	<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>									
4	Terbatasnya tenaga ahli/ pendamping dalam penanganan kasus yang dapat berakibat tidak maksimalnya pelayanan penanganan kasus						Mendorong peningkatan kompetensi tenaga yang ada melalui IHT/ Pengembangan kompetensi secara mandiri	Triwulan IV 2021		
	<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>									
5	Kerentanan ekonomi dan kondisi sosial masyarakat yang belum mapan yang menyebabkan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan masih tinggi						Mengkoordinasikan peningkatan Kesejahteraan Keluarga kepada OPD terkait guna meningkatkan ekonomi masyarakat	Triwulan II 2021		
	<b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>									
6	Masih tingginya angka ibu hamil yang rentan karena fisik dan nutrisinya sehingga berdampak pada kesehatan ibu dan bayinya						Mengkoordinasikan dengan OPD terkait agar komitmen pemerintah dalam peningkatan nutrisi Ibu Hamil konsisten	Triwulan II 2021		
	<b>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>									
7	Kurangnya kompetensi teknis bagi pengelola kegiatan anak yang dapat berdampak pada pencapaian kinerjanya						Mendorong Peningkatan kompetensi pengelola kegiatan melalui IHT dan Pengembangan Kompetensi secara mandiri	Triwulan IV 2021		

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket.	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket.
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
	<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>									
8	Kesulitan ekonomi dan rendahnya pengetahuan terkait hak-hak anak yang berdampak pada masih tingginya kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap anak						Peningkatan pelaksanaan sosialisasi program perlindungan anak dan ekonomi kreatif bagi remaja	Triwulan II 2021		
	Masalah/Risiko Baru: .....									

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan tanggal terjadinya risiko pada tahun berjalan

Kolom e diisi dengan penyebab peristiwa risiko saat terjadi pada tahun berjalan

Kolom f diisi dengan dampak peristiwa risiko pada tahun berjalan

Kolom g diisi dengan keterangan tambahan

Kolom h diisi dengan rencana tindak pengendalian (RTP)

Kolom i diisi dengan rencana pelaksanaan RTP

Kolom j diisi dengan realisasi pelaksanaan RTP

Kolom k diisi dengan keterangan tambahan

LAMPIRAN II  
RENCANA TINDAK PENGENDALIAN  
DPPKBP3A KABUPATEN BANYUMAS  
TAHUN 2021

KRITERIA PENILAIAN RISIKO DALAM PENYUSUNAN RTP DPPKBP3A  
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021

1. Skala Kemungkinan Risiko

- a. Kriteria Kemungkinan dapat menggunakan pendekatan statistik (*probability*), frekuensi kejadian per satuan waktu (hari, minggu, bulan, tahun), atau dengan *expert judgment*.
- b. Penentuan peluang terjadinya Risiko di Pemerintah Kabupaten Banyumas menggunakan pendekatan kejadian per satuan waktu, yakni dalam periode 1 tahun. Ada dua kriteria penentuan kemungkinan yaitu berdasarkan persentase atas kegiatan/transaksi/unit yang dilayani dalam 1 tahun dan jumlah frekuensi terjadinya dalam 1 tahun.
- c. Level kriteria kemungkinan terjadinya risiko di Pemerintah Kabupaten Banyumas meliputi:

No	Kriteria Kemungkinan	Definisi Kriteria Kemungkinan	Skala Nilai
1	Hampir tidak pernah terjadi	Kecil kemungkinan dan dapat diabaikan	1
		Probabilitas sangat rendah, hampir mendekati nol	
		Peristiwa hanya timbul pada keadaan luar biasa	
2	Jarang Terjadi	Kecil kemungkinan tetapi tidak dapat diabaikan	2
		Probabilitas rendah, tetapi lebih besar dari pada nol	
		Mungkin terjadi sekali dalam 25 tahun	
3	Kadang terjadi	Probabilitas kurang dari 50% tetapi masih cukup tinggi	3
		Mungkin terjadi sekali dalam 10 tahun	
4	Sering Terjadi	Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50	4
		Mungkin terjadi kira-kira sekali dalam setahun	
5	Hampir Pasti Terjadi	Kemungkinan terjadi > 50%	5
		Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun	

- d. Penggunaan Kriteria Kemungkinan ditentukan oleh pemilik Risiko dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - 1) Persentase digunakan apabila terdapat populasi yang jelas atas kegiatan tersebut.
  - 2) Jumlah digunakan apabila populasi tidak dapat ditentukan.

2. Skala Dampak Risiko

Kriteria dampak risiko dapat diklasifikasikan dalam beberapa area dampak sesuai dengan jenis kejadian Risiko yang mungkin terjadi. Area dampak yang terdapat di

Pemerintah Kabupaten Banyumas berdasarkan area dampak yang memiliki bobot tertinggi hingga terendah, meliputi:

a. Beban Keuangan Negara

Dampak risiko berupa jumlah tambahan pengeluaran negara baik dalam bentuk uang dan setara uang, surat berharga, kewajiban, dan barang.

b. Penurunan Reputasi

Dampak Risiko berupa rusaknya citra/nama baik/wibawa Pemerintah Kabupaten Banyumas yang menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat menurun.

c. Sanksi Hukum

Dampak Risiko berupa hukuman yang dijatuhkan atas perkara di pengadilan baik menyangkut pegawai atau organisasi.

d. Kecelakaan Kerja

Dampak Risiko berupa gangguan fisik dan mental yang dialami pegawai dalam pelaksanaan tugas kedinasan.

e. Gangguan terhadap layanan organisasi

Dampak Risiko berupa simpangan dari standar layanan yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

f. Gangguan terhadap kinerja

Dampak Risiko berupa tidak tercapainya target kinerja yang ditetapkan dalam kontrak kinerja ataupun kinerja lainnya.

No	Kriteria Dampak	Definisi Kriteria Dampak	Skala Nilai
1	Sangat Kecil	Kerugian kurang dari Rp100.000,00	1
		Tidak berdampak pada pencemaran/reputasi	
		Tidak material	
		Ancaman psikis	
		Agak mengganggu pelayanan ( $x < 5\%$ dari jam operasional layanan harian)	
		Hambatan tertangani, tujuan tercapai	
2	Kecil	Kerugian Rp100.000,00 sampai dengan Rp1.000.000,00	2
		Berdampak pada pandangan negatif terhadap institusi dalam skala lokal (telah masuk dalam pemberitaan media lokal)	
		Pelanggaran biasa, sanksi teguran	
		Cukup mengganggu jalannya pelayanan ( $5\% \leq x < 15\%$ dari jam operasional layanan harian)	
		Cedera fisik dan mental ringan	
		Kegiatan terhambat, kurang efisien	
3	Sedang	Kerugian yang terjadi diatas Rp1.000.000,00 sampai Rp10.000.000,00	3
		Berdampak pada pandangan negatif terhadap institusi dalam skala nasional (telah masuk dalam pemberitaan media lokal dan nasional)	
		Pelanggaran biasa, sanksi tertulis	
		Mengganggu kegiatan pelayanan secara cukup signifikan ( $15\% \leq x < 35\%$ dari jam operasional layanan harian)	
		Cedera fisik dan mental sedang	
		Kegiatan terhambat, kurang efektif	

4	Besar	Kerugian yang terjadi diatas Rp10.000.000,00 sampai Rp100.000.000,00	4
		Merusak citra institusi dalam skala nasional (telah masuk dalam pemberitaan media lokal dan nasional)	
		Pelanggaran serius sanksi tertulis	
		Terganggunya pelayanan secara signifikan (35% ≤ x < 50% dari jam operasional layanan harian)	
		Cedera fisik dan mental berat	
		Kegiatan sangat terhambat, tidak efektif	
5	Sangat Besar	Kerugian yang terjadi diatas Rp100.000.000,00	5
		Merusak citra institusi dalam skala nasional, penggantian pucuk pimpinan instansi secara mendadak	
		Pelanggaran serius, terkena sanksi hukum	
		Terganggunya pelayanan secara sangat signifikan (x ≥ 50% dari jam operasional layanan harian)	
		Kematian	
		Kegiatan terhenti, tujuan tidak tercapai	

### 3. Skala Tingkat Risiko

- Kombinasai antara level kemungkinan dan level dampak kemungkinan menunjukkan besaran risiko;
- Level kemungkinan terjadinya risiko, level dampak, dan level risiko masing-masing menggunakan 5 (lima) skala tingkatan (level);
- Matriks level risiko di Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagaimana tabel berikut:

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi	20-25	Merah
Tinggi	16-19	Oranye
Sedang	12-15	Kuning
Rendah	6-11	Biru
Sangat Rendah	1-5	Hijau

Dasar dalam penentuan toleransi risiko atau tingkat risiko yang dapat diterima, yakni batasan besaran kuantitatif level kemungkinan terjadinya dan dampak risiko yang dapat diterima atau disebut dengan selera risiko ditetapkan sebagai berikut:

- Risiko pada level rendah dan sangat rendah dapat diterima dan tidak perlu dilakukan proses mitigasi risiko;
- Risiko dengan level sedang hingga sangat tinggi harus ditangani untuk menurunkan level risikonya.